

**PENGGUNAAN PETISI DARING DALAM GERAKAN SOSIAL BARU  
(STUDI KASUS PETISI “GUNUNG BULU BAWAKARAENG  
HARUS SEGERA DI *HERITAGE!*”)**

***UTILIZATION OF ONLINE PETITION IN NEW SOCIAL MOVEMENT  
(CASE STUDY PETITION "BULU BAWAKARAENG MOUNTAIN  
SHOULD HAVE TO IMMEDIATELY IN HERITAGE!")***

**SKRIPSI**

**AZWAR RADHIF**

**E 411 15 504**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**PENGUNAAN PETISI DARING DALAM GERAKAN SOSIAL BARU  
(STUDI KASUS PETISI “GUNUNG BULU BAWAKARAENG  
HARUS SEGERA DI *HERITAGE!*”)**

**SKRIPSI**

**AZWAR RADHIF  
E 411 15 504**



**SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH DERAJAT KESARJANAAN PADA  
DEPARTEMEN SOSIOLOGI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN**

JUDUL : PENGGUNAAN PETISI DARING DALAM GERAKAN  
SOSIAL BARU (STUDI KASUS PETISI “GUNUNG BULU  
BAWAKARAENG HARUS SEGERA DI HERITAGE!”)  
NAMA : AZWAR RADHIF  
NIM : E41115504

Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II setelah  
dipertahankan di depan panitia ujian skripsi pada tanggal 27 Januari 2020.

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

  
**Dr. Buhari Mengge, M.A.**  
NIP. 19690529 200312 1002

**Pembimbing II**

  
**Dr. M. Ramli AT, M.Si**  
NIP. 19660701 199903 1002

**Mengetahui,  
Ketua Departemen Sosiologi  
FISIP UNHAS**

  
**Dr. Mansyur Radjab, M.Si**  
NIP. 19580729 198403 1 003

**HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Evaluasi Skripsi pada  
Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin

Oleh :

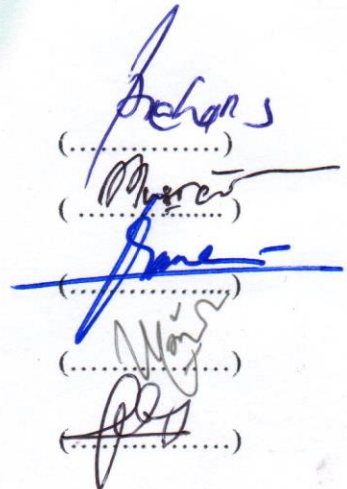
JUDUL : PENGGUNAAN PETISI DARING DALAM GERAKAN SOSIAL  
BARU (STUDI KASUS PETISI "GUNUNG BULU  
BAWAKARAENG HARUS SEGERA DI HERITAGE!")  
NAMA : AZWAR RADHIF  
NIM : E41115504

Pada :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Januari 2020  
Tempat : Ruang Ujian Departemen Sosiologi Fisip Unhas

**TIM EVALUASI SKRIPSI**

KETUA : Dr. Buhari Mengge, M.A.  
SEKERTARIS : Musrayani Usman, S.Sos, M.Si  
ANGGOTA : Dr. M. Ramli AT, M.Si  
Dr. Nuvida Raf, S.Sos, M.A  
Drs. Muh. Iqbal Latief, M.Si

  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azwar Radhif

NIM : E411 15 504

Judul : Penggunaan Petisi Daring Dalam Gerakan Sosial Baru

(Kasus “Petisi Gunung Bulu Bawakaraeng Harus Segera Di  
*Heritage*”)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Januari 2020

Yang Menyatakan



*Azwar Radhif*  
Azwar Radhif

## HALAMAN PERSEMBAHAN

---

Bismillahirrahmanirahim, Sebaik-baiknya karya adalah karya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Sungguh berbahagialah manusia sebagai makhluk yang diberikan keberkahan berupa akal sehat oleh Allah SWT, yang sebijaknya digunakan untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Karya yang sangat sederhana ini penulis dedikasikan kepada seluruh manusia yang berjuang melawan kezholiman dan perjuangan demi kehidupan yang berkelanjutan, dimanapun dan kapanpun itu perjuangan harus terus digaungkan.

*A Luta Continua!*



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tak henti-hentinya penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nafas kehidupan kepada penulis, sehingga dapat bertemu dengan berbagai manusia yang turut memberi sumbangsih terhadap perjalanan intelektual penulis. Pertemuan dengan manusia-manusia ini telah mengilhami lahirnya karya yang sangat sederhana ini yang berjudul **Penggunaan Petisi Daring Dalam Gerakan Sosial Baru (Kasus Petisi Gunung Bulu Bawakaraeng Harus Segera Di Heritage)**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada *Nabiyullah* Muhammad SAW, seorang tokoh revolusioner sejati yang telah menanamkan benih-benih perjuangan menghapuskan ketertindasan dan eksploitasi di muka bumi. Tak lupa pula perjuangan Ahlul Bait dan Sahabat Beliau yang kisahnya menjadi inspirasi dan refleksi penulis untuk memperbaiki perilaku terhadap mahluk lainnya.

Dalam perjalanannya, karya sederhana ini tak lahir dengan sendiri. Pertemuan dengan manusia-manusia turut memberikan sumbangsih terhadap perjalanan penulis, sehingga melatarbelakangi terselesaikannya karya ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya melantungkan doa yang memberkati penulis dalam menyelesaikan karya ini. Terimakasih atas segala bantuan yang tak terhingga sehingga penulis dapat sampai pada titik ini. Khususon Ayahanda dan Ibunda Penulis, **Abba Muh. Zaid Yusuf Naru dan Mami Almarhumah Wahida Sahnas Maqbul serta ke-4 adik** yang menjadi prioritas utama penulis dalam menjalani kehidupan. Serta keluarga yang telah penulis anggap sebagai orang tua sendiri, **Mamma Iqbal Fahmeed dan Aunty Fauziah, Uncle Munawwar dan Aunty Munni, Mami Salmah** dan seluruh **sepupu-sepupu** yang juga telah penulis anggap sebagai kakak-adik sendiri.
2. Pembimbing Akademik penulis, **Dr. Buhari Mengge, M.A dan Dr. Ramli AT, M.Si** yang telah membantu menyelesaikan karya ini. Terimakasih telah

menjadi teman diskusi penulis dan telah bersedia meluangkan waktu untuk memperbaiki segala kekurangan penulisan karya ilmiah ini.

3. **Prof. Dr. Hj. Dwia Ariestina Pulubuhu, MA** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
4. **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh Jajarannya.
5. **Dr. Mansyur Rajab, M.Si** selaku Ketua Departemen dan **Dr. M. Ramli, AT** selaku Sekretaris Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta Seluruh **Dosen** Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
6. **Staf** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta **Staf** Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang turut membantu pengurusan administrasi penulis.
7. Keluarga ideologis penulis di **Kemasos FISIP Unhas**, terimakasih telah memberikan amanah untuk menjadi pelayan di organisasi ini. Kepada kakak-kakak dan adik-adik yang telah memberikan ruang dialektis dan praksis kepada penulis, semoga tetap istiqomah di jalan kebenaran, *Bersatu dalam Kebenaran!*.
8. Akhi dan Ukhty Progresif **Analogis 2015**, telah menjadi kawan sedekat nadi dalam melewati bahtera bermahasiswa selama 3 tahun 18 bulan.
9. Masyarakat **Sospol Unhas** yang turut mewarnai perjalanan intelektual penulis, terimakasih atas ruang-ruang kebersamaannya. Khususon Rekan seperjuangan Penulis, teman-teman **Dema Kema FISIP Unhas** periode 2019-2020, terimakasih telah menjadi kawan yang baik dalam berjuang, mohon maaf apabila penulis tak dapat membersamai perjuangan hingga titik akhir. *Bersama Bersatu Berjaya*.
10. Berbagai organisasi perjuangan di Unhas, **Resist Sospol, Communal Council, Federasi Mahasiswa Unhas, kawan-kawan BEM dan HMD se-Unhas** yang memberikan warna kepada penulis dalam memahami gerakan dan menjadi



rekan perjuangan di jalanan. Barisan massa, almamater dan toa telah menjadi simbol perjuangan, semoga tetap istiqomah kamerad.

11. Mahasiswa **KKN Gel. 101**, khususnya Kecamatan Lau Kabupaten Maros yang telah kebersamai selama beberapa puluh hari, semoga amal dan ibadahnya diterima.
12. Para Kamerad dan Kameradiyah di **LAW Unhas**, terimakasih telah menjadi rekan dialektika penulis, semoga perjuangannya selalu dirahmati Allah SWT. *Bersama Bersatu Berlawan!*.
13. Guru Penulis, **Pak Syamsuddin Simmau, S.Sos, M.Si** dan rekan seperjuangan hingga hari ini di Maupa, **Kak Ilham Alfaiz dan Muh. Fauzi** yang telah banyak mempengaruhi pola fikir dan perilaku penulis dalam memahami problematika masyarakat dengan menulis, demi terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
14. Segenap pejuang Gunung Bulu Bawakaraeng, **Abang Nevy James, Kak Yaqub, Kak Natas, Kak Rewo, Kak Aslam, Kak Akbar dan kawan-kawan FISS**, telah membuka fikiran penulis dalam memahami masalah lingkungan, yang menjadi permasalahan utama dari kerusakan ekologis. Tak lupa pula kepada kawan-kawan di **UKM PA Kompas FISIP Unhas**, terimakasih atas ruang dan waktunya.
15. Seluruh warga **IKMP Parepare** yang telah menghantarkan penulis menjadi mahasiswa dengan mengenalkan kehidupan organisasi dan kampus.
16. Segenap **Supporter Sepakbola Makassar**, Komunitas Literasi Sepakbola Makassar, pagolo.net, Integritas PSM dan penghuni tribun selatan Curva Sud Mattoanging, *Ale!*
17. Pejuang Agraria di **Front Nadhliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Makassar**, tetap istiqomah kamerad mewujudkan keadilan agraria.
18. Kawan diskusi sekaligus informan penulis dalam penelitian ini, **Kak Desri, Fikar dan Hasbi**. Terimakasih atas kesedian dan waktunya.

Berkali-kali penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah menyertai proses penulis serta membantu penulis menyusun skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Makassar, 28 Januari 2020

Penulis

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penggunaan petisi daring sebagai sebuah instrumen gerakan sosial baru. Terkhusus pada isu ekologi, kerusakan gunung Bulu Bawakaraeng yang terjadi akibat cara pandang dan perilaku merusak manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dimana terdapat upaya untuk mengeksplorasi dan mengurai fenomena dengan menggunakan dasar penelitian studi kasus. Penelitian ini mengambil data dari 9 orang informan yang terdiri dari pembuat petisi dan partisipan petisi. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat masalah utama yang terjadi di Gunung Bulu Bawakaraeng yang bersifat materiil maupun non-materiil. Permasalahan materiil seperti tergerusnya fungsi gunung, sedangkan non-materiilnya seperti kerusakan aspek kedudukan dan aspek sejarah di Gunung Bulu Bawakaraeng. Petisi ini kemudian lahir untuk merespon permasalahan ini, yang diiniasi oleh organisasi bernama Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS). Petisi dibuat di situs *change.org* dalam wujud petisi daring yang hingga kini ditandatangani 32.924 partisipan. Dampak dari penggunaan petisi terbagi dalam dampak internal FISS maupun eksternal FISS. Di internal FISS, petisi berdampak pada bertambahnya motivasi organisasi dan bertambahnya anggota FISS. Sedangkan di eksternal FISS, terdapat dukungan masyarakat sehingga terjadi penurunan jumlah pengunjung di Gunung Bulu Bawakaraeng serta telah menarik perhatian pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kerusakan Ekologi, Petisi Daring, Gerakan Sosial Baru

### ***Abstract***

*The purpose of this study was to determine the pattern of utilization online petitions as an instrument of new social movements. Specifically on the ecological issue, the damage to Bulu Bawakaraeng mountain caused by the perspective and destructive behavior of humans. This research uses descriptive qualitative research methods, where there are efforts to explore and analyze phenomena using the basis of case study research. This study took data from 9 informants consisting of petitioners and petition participants. The results of this study are that there are major problems that occur in Mount Bulu Bawakaraeng which are both material and non material. Material problems such as erosion of mountain functions, while non-material problems such as damage to the position and historical aspects of Mount Bulu Bawakaraeng. This petition was born to respond to this problem, which was initiated by an organization called the Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS). The petition was made on the site change.org in the form of an online petition which has so far been signed by 32,924 participants. The impact of the use of petitions is divided in the internal and external impacts of FISS. Internally in FISS, the petition has an impact on increasing organizational motivation and increasing FISS members. Whereas in the external FISS, there is community support so that there is a decrease in the number of visitors at Mount Bulu Bawakaraeng and has attracted the attention of local governments*

*Keywords: Ecological Damage, Online Petitions, New Social Movements*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PENERIMAAN TIM EVALUASI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat Teoritis/Akademis .....	6
2. Manfaat Praktis .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. <i>Cyberspace</i> dalam Gerakan Sosial .....	8
B. Gerakan Sosial .....	12
1. Gerakan Sosial Baru .....	14
2. Gerakan Sosial Gunung Bulu Bawakaraeng <i>Heritage</i> .....	18
C. Petisi Daring Sebagai Aktivisme Digital .....	23
D. Kerangka Konseptual .....	32
E. Penelitian Terdahulu .....	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe dan Dasar Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	44
1. Lokasi Penelitian.....	44
2. Waktu Penelitian.....	44
C. Teknik Penentuan Informan.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	46
1. Data Primer .....	47
2. Data Sekunder.....	48
E. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	49
A. Forum Intelektual Selatan Sulawesi .....	49
1. Proses Pembentukan .....	49
2. Struktur Gerakan.....	51
3. Ideologi Gerak .....	54
B. Petisi Daring <i>change.org</i> .....	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Identitas Informan.....	60
B. Proses Gerakan Sosial Gunung Bulu Bawakaraeng <i>Heritage</i> .....	61
1. Permasalahan di Gunung Bulu Bawakaraeng.....	65
2. Dukungan dan Hambatan dalam Gerakan Sosial .....	75
3. Tujuan ( <i>Goals</i> ).....	80
C. Proses Pemanfaatan Petisi <i>change.org</i> Gunung Bulu Bawakaraeng Harus Segera di <i>Heritage!</i> .....	82
1. Kegunaan Petisi Daring .....	84
2. Proses Penginformasian Petisi .....	90
D. Pengaruh Penggunaan Petisi “Gunung <i>Bulu</i> Bawakaraeng harus segera di <i>heritage!</i> ” .....	94
1. Internal Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS) .....	94

2. Eksternal Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS).....	97
BAB VI PENUTUP .....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran .....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	109
Lampiran .....	113



## Daftar Gambar

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	37
Gambar 4.1 Peta Kota Makassar.....	50
Gambar 4.2 Logo FISS.....	58
Gambar 4.3 Struktur Organisasi FISS.....	61
Gambar 5.1 Konsep Hubungan Intersubjektif.....	72

## Daftar Tabel

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar.....	51
Tabel 5.1 Jumlah Kunjungan 17 Agustus.....	102

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kehidupan manusia di setiap fase waktu ditentukan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jared Diamond (2016) mengisahkan bagaimana kekalahan Kaisar suku Indian Inka, Atahuallpa yang memiliki puluhan ribu pasukan dari tentara Spanyol yang hanya berjumlah 150 orang, dipengaruhi oleh faktor informasi-komunikasi yang dimiliki oleh pihak Spanyol terkait suku Indian. Perkembangan teknologi komunikasi hingga kini telah sampai di fase komunikasi interaktif, dimana setiap individu melalui media baru dapat berkomunikasi langsung menggunakan teknologi secara dua arah (Zamroni, 2009).

Komunikasi interaktif media baru menjadikan masyarakat semakin dekat dengan arus informasi. kedekatan akses terhadap informasi kemudian menjadikan semakin mudahnya masyarakat terlibat dalam setiap permasalahan yang terjadi. Peran media baru dalam hal ini internet menjadi salah satu potensi besar dalam gerakan sosial jika dimanfaatkan sebagai metode gerakan sosial. Contoh kasus yang bisa dilihat dari integrasi petisi daring sebagai media baru dan gerakan sosial adalah kasus yang menimpa korban perkosaan Baiq Nuril. Kampanye petisi yang mendesak pemerintah segera melindungi korban kekerasan seksual ini memberikan dampak langsung, termasuk perhatian masyarakat terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang sedang marak beberapa waktu terakhir.

Kehadiran situs *change.org* sebagai penyedia petisi daring merupakan upaya penggabungan teknologi informasi dengan gerakan sosial. Jumlah pengguna media internet yang semakin banyak dan pola komunikasi yang intens menjadi potensi yang dapat menunjang perubahan sosial. Ini juga didukung oleh usia pengguna media internet yang didominasi oleh generasi muda yang cenderung visioner dan memiliki semangat-semangat perubahan. Dari laporan survey perilaku pengguna Internet yang dikeluarkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di tahun 2018 mencapai 171 juta jiwa penduduk Indonesia yang didominasi oleh kalangan anak muda di rentang umur 15-29 tahun (Indonesia, 2019).

*Change.org* merupakan salah satu media petisi berbasis virtual yang digagas untuk memperjuangkan perubahan sosial yang diinginkan oleh pembuat dan partisipan petisi. Media ini telah menghubungkan lebih dari 200 juta orang dari 196 negara dengan klaim telah memenangkan 33.742 kasus di berbagai negara. Ditahun 2018 kemarin, Change Indonesia telah berhasil memenangkan 7 kasus besar melalui penyebaran petisi. Total partisipan yang mengisi petisi telah berjumlah lebih dari dua juta orang, belum termasuk kemenangan-kemenangan lainnya (Change.org, 2018).

Peran *change.org* disini dapat dilihat sebagai pihak yang memediasi keresahan masyarakat kepada instansi terkait sehingga memungkinkan perubahan. *Change.org* memediasi protes sosial yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah ataupun publik dalam bentuk menggalang dukungan. Selain itu, *change.org* sangat

berkontribusi dalam pengkampanyean masalah sehingga dapat memunculkan keresahan bersama.

Tolak ukur dari keberhasilan petisi tidak dapat diukur dari jumlah penandatanganan petisi melainkan pada kesadaran masyarakat, dukungan publik dan penyebaran media yang dapat memantik pola komunikasi intens baik daring maupun luring, dukungan dari aktor politik pembuat kebijakan, perubahan dan penerapan kebijakan lainnya. Jumlah penandatanganan memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran informasi kepada media publik dan penegasan sikap politik sebagai wujud partisipasi politik warga negara. Hal yang patut diinsafi bersama bahwa petisi daring bukan hanya media gerakan sosial tunggal, melainkan varian gerakan sosial yang memberikan ruang pada metode gerakan sosial lainnya untuk saling melengkapi metodologi dalam pengawalan isu.

Demikian pula jika kita melihat gerakan sosial sebagai sebuah aktivisme yang terpolarisasi dan terstruktur. Metode yang digunakan dalam gerakan sosial dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi. Apalagi dalam sebuah gerakan sosial, komunikasi sangat diperlukan sebagai media informasi kepada internal kelompok maupun masyarakat umum terkait perkembangan gerakan. Gerakan sosial melalui media petisi daring akan mempengaruhi perkembangan isu yang terjadi, terkhusus pada permasalahan yang coba untuk diadvokasi oleh kelompok atau organisasi yang memiliki tujuan, manajemen, dan memiliki durasi waktu.

Seperti yang dilakukan oleh Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS) dengan semangat kesadaran ekologi. Pada 4 Mei 2018 FISS menginsiasi petisi daring di *change.org* yang mengangkat isu Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!*. Petisi ini telah ditandatangani oleh 32.924 partisipan petisi yang bersepakat dengan gagasan perlindungan gunung Bulu Bawakaraeng yang keberlanjutannya sedang terancam .

Gerakan Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!* muncul atas kesadaran akan mulai rusaknya Gunung Bulu Bawakaraeng akibat dari eksploitasi alam melalui pola pikir dan perilaku destruktif. Perilaku destruktif ini didasari atas ketidakfahaman manusia akan kedudukan alam sebagai sentral kehidupan. Gagalnya mendudukan alam sebagai bagian terbesar dari manusia menjadikan alam sebagai ruang eksploitasi. Terlihat dari kerusakan fisik di antaranya adalah kerusakan geomorfologi, kerusakan ekologi, kerusakan vegetasi dan habitat, serta kerusakan pada aspek estetika. Sedangkan kerusakan non fisik adalah kerusakan akibat aktifitas-aktifitas yang bertentangan dengan kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng sebagai makhluk ciptaan Tuhan. (Sulawesi, 2019).

Hal ini penting untuk didokumentasikan, sebagai sebuah referensi pola gerakan sosial, terutama pada gerakan sosial lingkungan yang kian banyak bermunculan beberapa waktu terakhir. Isu kerusakan lingkungan menjadi fokus permasalahan yang banyak diangkat aktivis ekologi. Melihat semakin banyaknya bentuk pengrusakan lingkungan akibat ulah tangan manusia sehingga memungkinkan semaraknya gerakan yang merespon ini. Apalagi jika berhubungan

dengan keseimbangan sosial melihat kondisi ekologis yang tengah mengalami degradasi. Kehadiran manusia sangat bergantung pada kondisi ruang yang menjadi tempat interaksi manusia. Jikalau ruang telah rusak, maka disini eksistensi manusia dan makhluk lainnya akan terancam.

## **B. Rumusan Masalah**

Gerakan sosial menjadi instrumen penting dalam melakukan perubahan sosial. Hampir di setiap perubahan besar, gerakan sosial menjadi instrumen perubahan, terutama berkaitan dengan konflik dan kekuasaan. Konflik merupakan sebuah keniscayaan dalam masyarakat, apalagi bila diikuti dengan hasrat dominasi dan kekuasaan. Bila kekuasaan tersebut mendominasi, disitu niscaya muncul kelompok oposisi. Senada dengan perilaku merusak manusia terhadap gunung. Bagi sebagian kelompok yang memperjuangkan kelestarian alam, merusak alam sama halnya dengan merusak manusia. Oleh karena itu tindakan merusak alam harus dilawan. Demikian halnya petisi yang dibuat oleh Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS) di situs *change.org*. Petisi ini muncul sebagai reaksi atas pola pikir dan perilaku manusia yang merusak dan tidak tegasnya pemerintah melihat permasalahan di gunung Bulu Bawakaraeng. Petisi ini mewakili keresahan masyarakat Indonesia atas kerusakan yang dilakukan tangan-tangan manusia.

Berangkat dari penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :



1. Bagaimana proses gerakan sosial Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!*?
2. Bagaimana proses pemanfaatan petisi daring Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!*?
3. Bagaimana pengaruh petisi daring Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!*?

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika dan perkembangan penggunaan petisi daring dalam kasus gerakan sosial Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!*, sebagai salah satu bentuk gerakan sosial baru yang muncul pasca perkembangan media digital.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis/Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan secuil pengetahuan dalam memahami gerakan sosial melalui penggunaan media daring, terkhusus pada penggunaan petisi daring *change.org*. Tujuan spesifiknya untuk melihat bagaimana pola gerakan sosial yang terjadi di tengah kemajuan industri teknologi informasi, juga hubungan petisi daring dengan varian gerakan sosial lainnya. Dalam manfaat kajian lingkungannya, paradigma intersubjektif sekiranya dapat

dipertimbangkan sebagai alternatif cara berfikir dari paradigma subjek-objek menuju paradigma subjek-subjek antara relasi manusia dan alam.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan para pegiat aktivisme sosial yang memiliki visi perubahan. Mempertimbangkan efektifitas petisi daring sebagai salah satu bentuk gerakan sosial di Kota Makassar dan keterhubungan dengan varian gerakan sosial lainnya. Selain itu tentunya membuka wawasan kita dalam melihat berbagai permasalahan alam akibat pola fikir dan perilaku destruktif manusia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. *Cyberspace* dalam Gerakan Sosial**

Konsepsi ruang publik awalnya digagas oleh seorang filsuf mazhab Frankfurt, Jurgen Habermas. Menurut Habermas, ruang publik adalah ruang dimana warga negara bisa berunding mengenai hubungan bersama sehingga menjadi sebuah arena institusi untuk berinteraksi pada hal-hal yang berbeda (Supriadi, 2017). Ruang publik merupakan sebuah media untuk mendiskusikan segala hal yang menjadi kepentingan bersama.

David Marquand mengartikan ruang publik sebagai Arena hidup sosial dengan tata aturan dan cara keputusan tersendiri, melintasi batas-batas sektoral; ia adalah sederet kegiatan yang dilakukan baik oleh orang-perorangan maupun badan/perusahaan swasta ataupun juga instansi-instansi pemerintah. Apa yang sentral dalam konsepsi ruang publik adalah nilai-nilai kewargaan, persamaan, pelayanan dan kepentingan umum yang dibedakan dari nilai-nilai yang disebut kepentingan pribadi (Hardiman, 2010).

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menembus batas jarak dan waktu kemudian menjadikan media baru sebagai ruang pertemuan virtual membicarakan berbagai hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan publik. Disini dapat dilihat bahwa dengan perkembangan teknologi informasi, telah menciptakan ruang publik baru yang memiliki fungsi-fungsi selayaknya ruang

publik nyata. Ruang publik menjadi semakin lebar sehingga mempermudah warga negara untuk ikut ambil bagian dalam mendukung proses berjalannya demokrasi. Ruang publik *cyber* diharapkan mampu menjadi media untuk mendekatkan komunikasi masyarakat sipil ke pengambil kebijakan, terutama persoalan aspirasi-aspirasi politik dan pengambilan kebijakan yang sebelumnya terkendala ruang.

Mc Luhan menjelaskan bahwa fenomena saling ketergantungan secara elektronik yang belum pernah terjadi sebelumnya, telah menciptakan kembali sebuah imajinasi tentang desa besar (*global village*). Perkembangan teknologi telah mempengaruhi keseluruhan masyarakat di mana mereka hidup dalam imajinasi ruangan bersama, yang diumpamakan sebagai sebuah desa global (*global village*). Perkembangan teknologi dalam media massa elektronik secara luas pada tahun pertengahan abad 20, seperti radio dan televisi, telah menyebabkan semakin mudahnya aliran informasi ke segala penjuru dunia (Pamungkas, 2015).

Kemampuan manusia menjelajahi alam jagat raya tanpa batasan ini membuat terciptanya realitas virtual (*hyperreality*), melatarbelakangi terciptanya ruang baru yang disebut *cyberspace*. Dalam arti sempit, *cyberspace* berarti kemampuan manusia menjelajahi ruang tanpa batasan geografis, ideologis, batasan normatif etis (tanpa menjelajahi dunia realitas). *Cyberspace* merupakan ruang simbolis yang menjadi tempat kediaman jutaan manusia tidak dalam fisik, menawarkan budaya baru kehidupan yang memungkinkan penjelajahan realitas tanpa batasan ruang dan waktu. Para pengagum teori *cyberspace* mempercayai bahwa perkembangan virtual

di masa depan akan membuat kita melampaui *real life* menuju yang disebut *virtual reality* (Hadi, 2005).

Anthony G. Wiliam (2003) membagi karakteristik ruang publik *cyber* menjadi empat bagian yang pokok, yang masing-masing menyingkapkan dimensi vital dari tempat-tempat perkumpulan dan cara-cara keterikatan yang baru ini, yaitu:

1. Kepemilikan sumber-sumber terdahulu, keahlian dan kapasitas yang dibawa oleh seseorang ke meja untuk mencapai pemfungsian politik tertentu. Setiap manusia memiliki kemudi atas informasi dan komunikasi mereka dengan publik, juga terkait hubungan masyarakat sipil dengan pengambil kebijakan.
2. *Inclusiveness/kezterlibatan*, merefleksikan komitmen yang telah lama berlangsung dalam susunan sosial demokrasi untuk keikutsertaan universal dalam pembuatan keputusan politik. Sifat egaliter dan partisipatif dari media baru menjadikan setiap pengguna dapat terlibat dalam permasalahan di sekelilingnya.
3. Kebebasan, yaitu mengemukakan ide-ide dan opini-opini seseorang untuk pemberian kekuatan hukum. Pengguna memiliki kehendak bebas dalam membangun narasi untuk sebuah tekanan politik.
4. Desain, suatu istilah luas yang mencakup arsitektur suatu network, termasuk apakah suatu network itu bersifat interaktif, tenang, aman, dan tidak disensor, dengan kapasitas yang cukup yang dilestarikan untuk tujuan-tujuan non komersil. Desain juga dapat dimaknai sebagai sebuah ruang yang mewujudkan eksistensi dari setiap penggunanya.

Sebagai sebuah ruang publik dalam tampilan digital, media internet menjadi sebuah ruang partisipasi politik masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Usman Hamid (2014) mengulas bagaimana kemajuan teknologi mempengaruhi praktik demokrasi kita.

Dulu, informasi disebar oleh seorang aktor yang besar kepada aktor yang lainnya yang berjumlah lebih banyak, dan tersebar. Informasi dibuat, dipilih, dan ditentukan oleh seorang aktor yang besar. Misalnya, media massa tradisional menyebarkan informasi kepada khalayak luas. Dalam menyebarkan informasi, media massa juga berkewajiban menjadi *the guardian angle of information* sehingga informasinya betul-betul menarik dan dibutuhkan oleh khalayak. Lebih dari itu, informasi tersebut diharapkan mampu mencerdaskan, atau dalam hubungannya dengan kekuasaan, media diandalkan menjadi penghubung dalam percakapan mengenai isu-isu publik. Bentuknya beragam, dari bahan cetak sederhana seperti pamflet, dan brosur, sampai alat pemancar radio dan televisi. Sekarang, informasi tidak hanya dibuat, dipilih atau ditentukan oleh satu pihak saja. Tidak pula hanya bisa disebarluaskan oleh aktor tradisional, tetapi juga diciptakan, direspon dan diperkuat oleh siapa saja, tanpa ada hierarki, yaitu melalui media sosial digital. Pada titik itu, ada semacam harapan bahwa teknologi sosial memang tidak diragukan lagi telah memberi manfaat bagi komunikasi alternatif dan efektif dalam skala yang lebih luas dan cepat (Hamid, 2014, hal. 163)

Keunggulan partisipasi politik dalam media digital adalah pengguna tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudahan akses ini kemudian turut mempengaruhi kuantitas pengguna media internet di Indonesia. Dari data yang dirilis Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII) pada tahun 2018, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 171,17 juta jiwa dari jumlah populasi 264,14 juta penduduk. Itu berarti pengguna internet di Indonesia mencapai 64,8%, mengalami peningkatan 10,12% dari tahun 2017 (Pratomo, 2019). Banyaknya jumlah pengguna internet dapat menjadi peluang untuk mewacanakan permasalahan sosial yang terjadi sehingga mendapat simpati dari warganet. Media internet dengan

kemudahannya kian menjadi ruang publik baru untuk berbagi, mengorganisir dan bergerak menyikapi masalah sosial.

Partisipasi politik dalam media digital dapat dituangkan dalam beberapa metode alternatif, salah satunya adalah melalui petisi daring. Kehadiran petisi daring sebagai salah satu metode gerakan sosial baru dapat menjadi media propaganda isu, penyebaran informasi, menggalang solidaritas dan menunjukkan kekuatan politik terhadap suatu permasalahan yang diangkat. Meskipun harus disadari bahwa gerakan sosial dalam media digital akan terasa kurang lengkap tanpa diseimbangkan dengan gerakan sosial fisik. Oleh karena itu, petisi daring didudukkan sebagai salah satu metode gerakan sosial yang digunakan untuk merespon suatu isu yang terjadi di masyarakat.

## **B. Gerakan Sosial**

Sejarah kehidupan manusia tak bisa dilepaskan dari konflik, konflik akan senantiasa mengiringi perkembangan masyarakat. Dalam gerakan sosial, konflik merupakan faktor utama yang menjadi cikal bakal lahirnya riak-riak gerakan sosial. Gore (1989) menegaskan bahwa gerakan sosial bukanlah peristiwa yang muncul begitu saja, karena konflik adalah keniscayaan dalam masyarakat, maka gerakan sosial pun juga selalu ada (Singh, 2010).

Konflik yang perlu disoroti dalam konteks lahirnya gerakan sosial adalah bentuk dominasi dari suatu kelompok tertentu. Dominasi ini kemudian yang melahirkan reaksi dari kelompok lain yang terdominasi, mewujud dalam bentuk aksi



kolektif konflikual. Singh mendefinisikan aksi kolektif konflikual sebagai usaha kolektif dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, tujuan-tujuan jangka menengah dan nilai-nilai yang dianut bersama, bahkan meski berhadapan dengan penentangan dan konflik (Singh, 2010).

Singh (2010) kemudian membagi aksi kolektif konflikual kedalam dua lapisan besar, dilihat dari model gerakan, tujuan dan periodik gerakan tersebut. Gerakan sosial merupakan salah satu bagian dari aksi kolektif konflikual yang didalamnya terdapat pola organisir, memiliki tujuan dan dalam waktu periode tertentu. Gerakan sosial menurut Davis (2012) adalah reaksi sekumpulan individu yang tidak puas akan kondisi kehidupan sosial yang terjadi. Terdapat ketamakan hidup yang dapat menyebabkan perpecahan sosial dan mental, maka gerakan sosial ini berkembang untuk menciptakan keharmonisan.

Singh (2010) mendefinisikan gerakan sosial secara padat dan ringkas, yaitu ruang untuk mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyarakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas-identitas dan warisan kultural mereka. Lebih lanjut ia menuturkan, gerakan sosial dicirikan oleh adanya suatu ideologi yang sama-sama dianut oleh partisipannya, suatu strategi yang dijalankan untuk mencapai tujuan, suatu struktur organisasi dengan sistem kepemimpinan dan komunikasi yang jelas, adanya lawan, adanya mobilisasi melawan pihak lawan dan yang terakhir adanya dampak mereka terhadap masyarakat

Petisi daring merupakan varian dari gerakan sosial yang mewujud sebagai aksi kolektif konflikual. Menurut Lofland (2015), Aksi kolektif konflikual dalam bentuk protes, merupakan pernyataan pendapat secara beramai-ramai maupun individu dan biasanya berupa pembangkangan, keluhan, keberatan atau ungkapan keenganan terhadap suatu gagasan atau tindakan, eskpresi penolakan secara lugas, deklarasi oleh pihak tertentu (Leda, 2018). Taylor dan Dike menjelaskan protes sebagai situs kontestasi di mana tubuh, simbol, identitas, praktik dan wacana yang digunakan untuk mengejar atau mencegah perubahan relasi kuasa dilembagakan (Raf, 2014).

### **1. Gerakan Sosial Baru**

Kemunculan gerakan sosial baru tak dapat dipisahkan dari kondisi ekonomi politik yang terjadi di Amerika Serikat dan sebagian benua Eropa. Sejak medio tahun 1960 ke 1970, gelombang gerakan sosial baru tumbuh di Amerika Serikat dan Eropa mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan isu kemanusiaan. Beberapa isu yang menjadi fokus perjuangan gerakan sosial baru pada awal-awal transformasinya adalah hak-hak sipil warga negara, gerakan anti perang dan penggunaan senjata nuklir, gerakan perdamaian, gerakan dekolonisasi dan gerakan sosial lainnya (Rusmanto, 2013).

Adapun studi gerakan sosial melihat terdapat perbedaan pola gerakan antara gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Studi Gerakan sosial lama yang berkembang hingga tahun 1950 cenderung difokuskan pada kerumunan kolektif yang bergerak atas isu bersama (*crowd*). Pola gerakan *crowd* inilah

yang dilihat menjadi kolektifitas liar, huru-hara dan kerumunan perusuh. Gerakan sosial lama cenderung dianggap sebagai reaksi kerumunan pemarah yang tak teorganisir dan sifatnya sementara. Meski dalam perjalanannya, terjadi perdebatan di antara pemerhati gerakan sosial, dikarenakan pandangan tersebut sangat bernuansa negatif dan cenderung menafikkan model kepemimpinan yang berasal dari intelektual pada gerakan sosial lama. Sebaliknya, gerakan sosial baru adalah representasi gerakan kemanusiaan, menentang segala bentuk eksploitasi dan ketertindasan kepada manusia maupun Alam. Gerakan ini diidentikkan dengan gerakan humanis, plural, rasionalitas dan reformis (Singh, 2010).

Singh (2010) menganalisis kemunculan gerakan sosial baru dari sudut pandang ekonomi politik,

Pergeseran dari masyarakat modernis ke post-modernis-post-*society*, dicerminkan oleh pergeseran serupa dalam bentuk gerakan-gerakan sosial yang berubah dari bentuk lama gerakan klasik dan neo-klasik ke gerakan sosial baru. Perubahan bentuk masyarakat kami ajukan sebagai fakta mencerminkan dan bersahut-sahutan dengan perubahan dalam bentuk gerakan sosial. Sementara gerakan lama diperlakukan sama dengan representasi kapitalisme dan industrialisme, yakni sebuah pantulan ekspansi dan dominasi peradaban Barat terhadap non Barat, gerakan sosial baru menyiratkan keletihan dari representasi modernis itu (Singh, 2010, hal. 122).

Menurut Jean Cohen (1985), gerakan sosial baru membatasi diri dalam empat pengertian yaitu:

- a. Aktor-aktor gerakan sosial baru tidak berjuang demi kembalinya komunitas-komunitas utopia tidak terjangkau dimasa lalu.
- b. Aktornya berjuang untuk otonomi dan pluralitas.
- c. Para aktornya melakukan upaya sadar untuk belajar dari pengalaman masa lalu, untuk merelatifkan nilai-nilai mereka melalui penalaran.
- d. Para aktornya mempertimbangkan keadaan formal negara dan ekonomi pasar.

Gerakan sosial baru merupakan sebuah kontinuitas dari gerakan sosial lama yang telah terkontektualisasi dengan perkembangan manusia. Menurut Situmorang (2013), Teori gerakan sosial baru memiliki beberapa ciri utamanya, yaitu

- a. Melihat dan memposisikan aktifitas gerakan sosial sebagai sebuah aksi kolektif yang rasional dan memiliki nilai positif.
- b. Membenahi dan mengkontekstualisasikan teori-teori gerakan sosial sebelumnya kedalam era kekinian seperti memodifikasi teori eksploitasi kelas Karl Marx menjadi teori keluhan yang lebih cocok dipergunakan dalam konteks saat ini, dimana aksi-aksi kolektif berkembang tidak hanya didorong oleh eksploitasi kelas pemilik alat produksi terhadap buruh di masyarakat kapitalis.

- c. Perkembangan yang pesat dari riset dan studi gerakan sosial di negara-negara diluar Amerika Utara dan Eropa Barat yang membuat kajian gerakan sosial semakin kaya.
- d. Teori gerakan sosial baru berhasil mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memfasilitasi tumbuhnya gerakan sosial, kuat lemahnya dan berhasil atau tidaknya sebuah gerakan sosial.

Lain halnya dengan gerakan sosial lama yang menekankan pada gerakan buruh, gerakan sosial baru lebih dominan diiniasi oleh kelas menengah yang cenderung berpendidikan (Raf, 2014). Oleh karena itu, gerakan sosial baru identik dengan gerakan-gerakan organisasi yang terdesentralisasi dan memiliki keunikan satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari menjamurnya komunitas-organisasi yang menginisiasi gerakan di beberapa permasalahan, seperti lingkungan, perempuan, hak kemanusiaan, dan lain sebagainya.

Permasalahan keberlanjutan lingkungan hidup menjadi tema menarik pegiat gerakan sosial kontemporer. Hal ini dikarenakan setiap waktunya, kerusakan ekologis kian semakin parah. Kenaikan suhu bumi hingga mencapai 1,5% celcius pada tahun 2018, kerusakan pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga kasus deforestasi membawa dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Terlebih lagi, corak pembangunan yang tak ramah lingkungan sehingga mempercepat degradasi lingkungan ini (Fajar, 2019).

## 2. Gerakan Sosial Gunung Bulu Bawakaraeng *Heritage*

Merunut dalam gerakan sosial baru, isu ekologis menjadi isu yang cukup diperhatikan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini tak lepas dari berbagai degradasi lingkungan yang dirasakan secara langsung masyarakat dunia. Kerusakan lingkungan terjadi karena eksploitasi manusia secara berlebihan dan perilaku destruktif lainnya, yang dilakukan untuk memuaskan hasrat manusia. Ketidaksadaran manusia akan aktivitas destruktifnya yang menghasilkan berbagai bencana alam, seperti banjir, longsor, abrasi dan lain sebagainya. Perlahan, tanpa sadar manusia sedang bergerak menuju gerbang kehancurannya sendiri. Senada dengan yang dikatakan oleh Zizek (2005), jauh lebih mudah untuk membayangkan akhir dari semua kehidupan di bumi daripada perubahan radikal yang jauh lebih sederhana dalam kapitalisme (Wikiqoutes, 2019).

Kerusakan lingkungan muncul akibat pola pikir manusia yang menempatkan alam sebagai objek eksploitasi. Kegelisahan ini yang kemudian mendasari kemunculan pandangan *deep ecology* atau lazim disebut ekosentrisme. Secara sederhana, *deep ecology* berarti cara pandang yang menempatkan alam sebagai sentral atau prioritas dari kehidupan. Di sini manusia diposisikan sebagai bagian dari alam yang tak terpisahkan. Pola pikir yang harus dibangun adalah kedudukan antara manusia dan lingkungan hidup adalah setara, manusia tak lebih tinggi dari alam. Sebab itu, perilaku dominasi manusia harus segera ditinggalkan untuk menciptakan keseimbangan alam (Situmorang, 2013).

Fritjof Capra menjelaskan bahwa *deep ecology* tidak membedakan antara manusia atau sesuatu yang lain dari lingkungan alamiah. Paham ini tidak melihat dunia sebagai sebuah objek yang terisolasi namun sebagai pertalian fenomena dimana secara mendasar saling berhubungan dan saling bergantung (Susilo, 2009, hal. 108).

Berbagai permasalahan yang terjadi akibat pandangan dominasi manusia terhadap alam ini terjadi karena kegagalan manusia memahami kedudukannya, sebagai bagian terkecil dari alam. Konsepsi etika lingkungan kemudian hadir untuk membatasi perilaku destruktif manusia. Etika lingkungan adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan hubungan manusia dan lingkungannya, tidak terlepas dari perhatiannya terhadap status moral makhluk hidup (biotis) dan tidak hidup (abiotis).

Adapun dalam etika lingkungan, telah terbangun moral manusia dalam memandang alam demi menjamin keberlangsungan kehidupan. Secara umum, etika ekologi (Suka, hal. 35) dapat dibagi dalam :

- a. Manusia adalah bagian dari Alam
- b. Menekankan hak hidup makhluk lain
- c. Memberikan perhatian kepada semua makhluk hidup
- d. Kebijakan manajemen lingkungan bagi semua makhluk
- e. Alam harus dilestarikan, tidak dikuasai
- f. Pentingnya melindungi keanekaragaman hayati
- g. Menghargai dan memelihara tata alam
- h. Mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem

- i. Mengkritik sistem ekonomi politik yang merusak dan menawarkan sistem alternatif yaitu sistem mengambil dan memelihara.

Kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia juga terjadi di Gunung Bulu Bawakaraeng. Gunung Bulu Bawakaraeng secara geografis terletak dalam beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan. Gunung Bulu Bawakaraeng memiliki posisi yang penting karena menjadi sumber air utama bagi Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Sinjai (Alam, 2019). Hal ini juga diperjelas menurut riset FAO, dimana gunung memiliki peran sebagai penghasil 60-80% air segar di bumi, hingga menyediakan ekosistem (Indonesia C. , 2018).

Keindahan alam Gunung Bulu Bawakaraeng mengundang kedatangan pengunjung yang berniat mengeksplorasi gunung ini. Tetapi permasalahan yang muncul adalah pola kunjungan yang massif dan sporadis, berdampak pada kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng. Perilaku desktruktif pengunjung Gunung Bulu Bawakaraeng diantaranya meninggalkan sampah di gunung, membuka jalur baru/lokasi camp, merusak pohon, dan kunjungan secara massif yang dapat merusak permukaan tanah. Pola kunjungan ini terjadi dalam beberapa momentum, seperti 17 Agustus dan hari sumpah pemuda yang dilakukan setiap tahunnya.

Perilaku destruktif ini merupakan konsekuensi dari cara pandang yang mengklasifikan manusia sebagai makhluk penguasa dan penjarah. Manusia dideskripsikan sebagai makhluk yang punya kemampuan berfikir dan kehendak



bebas. Ketidakhahaman akan kedudukan dirinya kemudian mendasari keserakahan dalam melihat hal diluar dirinya. Cara pandang dominasi ini terbentuk akibat bangunan berfikir yang memposisikan sesuatu hal diluar dirinya adalah objek yang sewaktu-waktu bisa dieksploitasi demi memuaskan hasrat manusia. Selain itu, tolak ukur konsumsi juga berpatokan pada hasrat keinginan, bukan lagi kebutuhan. Akibatnya gunung dipandang sebagai komoditas pemuas hasrat manusia.

Adapun data yang ditemukan Forum Komunikasi Pecinta Alam Unhas (2018), terdapat beberapa dampak dari perilaku merusak manusia terhadap keberlanjutan kehidupan Gunung Bulu Bawakaraeng, diantaranya:

- a. Ancaman longsor yang dapat terjadi akibat debit air di kaldera gunung yang tertampung. Lubang air di gunung terjadi karena penggundulan hutan yang menyebabkan patahan dan retakan di badan gunung.
- b. Terjadinya erosi tanah akibat penggundulan hutan yang menyebabkan kurangnya resapan air dan air hujan yang jatuh langsung ke tanah. Terbukanya tutupan lahan (pohon) menyebabkan terjadi erosi percik dan penurunan infiltrasi air kedalam tanah.
- c. Perubahan kualitas dan kuantitas air sungai di Gunung Bulu Bawakaraeng terjadi akibat kurangnya resapan air yang menyebabkan peningkatan jumlah debit air. Debit air yang melimpah akan bercampur dengan sampah pengunjung, menyebabkan pencemaran air dan penurunan kualitas air.

- d. Terancamnya kehidupan hewan dan tumbuhan akibat vegetasi terbuka. Seperti yang terjadi pada capung, burung endemik dan tikus hutan.
- e. Stigma negatif masyarakat terhadap Gunung Bulu Bawakaraeng yang dianggap sebagai tempat musyrik, akibat pemberitaan haji bawakaraeng yang keliru.

Kerusakan yang terjadi akibat perilaku manusia terhadap alam di Gunung Bulu Bawakaraeng memberi reaksi penentangan dari FISS. Perilaku destruktif ini terjadi karena belum ada regulasi yang memosisikan gunung sebagai subjek hukum (Sulawesi, 2019). Perlindungan hukum yang diberikan kepada gunung terjewantahkan dalam bentuk status pusaka saujana (*cultural heritage*).

Pusaka saujana (*cultural heritage*) adalah seluruh unsur-unsur budaya, baik benda maupun tak benda yang memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut: (1) berumur minimal 50 tahun; (2) sarat dengan nilai-nilai religius,estetik,historis, seni dan sains; (3) mewakili style,gaya hidup,waktu (kronos) atau daerah (topos) atau mindset (logos) tertentu; (4) ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang UU.No.3/1990 tentang Benda Cagar Budaya (Runa, Warnata, & Mahaputra, 2011).

Gerakan Gunung Bulu Bawakaraeng *heritage* ini merupakan salah satu gerakan perlindungan terhadap kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng dengan tujuan diberikannya status *cultural landscape heritage* dan perlindungan hukum kepada gunung Bulu Bawakaraeng. Kedepannya, dengan status *cultural landscape*

*heritage* diharapkan akan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjaga potensi pola pikir dan perilaku merusak manusia.

Forum Intelektual Selatan Sulawesi merupakan organisasi gerakan lingkungan dan pendidikan yang fokus pada pengawalan Gunung Bulu Bawakaraeng. Salah satu metode gerakannya yang cukup memantik ketertarikan publik adalah petisi daring “Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage*!” yang digunakan di media *change.org*.

Forum Intelektual Selatan Sulawesi untuk Gunung Bulu Bawakaraeng adalah suatu bentuk kewajiban dalam rangka mengingatkan bahwa kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng sesungguhnya berada dalam cultural landscape *heritage* (pusaka saujana) yang patut untuk dilindungi, dipelihara, dipertahankan dan diperjuangkan (Sulawesi, 2018).

Dukungan dari beberapa pihak terus diberikan melalui petisi tersebut. Hingga kini petisi daring Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage*! telah mencapai 32.924 partisipan. Isi dari petisi ini adalah desakan kepada pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar memberikan perhatian kepada kondisi Gunung Bulu Bawakaraeng dengan memberikan perlindungan hukum, agar terhindar dari pola pikir dan perilaku merusak gunung.

### **C. Petisi Daring Sebagai Aktivisme Digital**

Pemanfaatan media internet sebagai ruang publik virtual membentuk pola baru dalam gerakan sosial. Sebab, internet dapat melampaui hambatan dari gerakan sosial sebelumnya, dalam persoalan jarak dan waktu, terlebih lagi jikalau dibenturkan dengan kebutuhan gerakan akan informasi dan komunikasi. Media

internet memiliki peluang yang besar sebagai varian metode gerakan yang akan memudahkan komunikasi dari masyarakat sipil ke apatatus negara, terutama menyangkut masalah partisipasi politik. Hal ini penting, mengingat bahwa negara kita menganut asas demokrasi, di mana secara filosofis, demokrasi memberi ruang yang besar kepada masyarakat sipil untuk terlibat dalam persoalan aspek sosial-politik.

Aktivisme sosial merupakan bagian praksis dari partisipasi politik individu dalam menyikapi suatu permasalahan dengan gerakan sosial. Keterlibatan individu memiliki andil dalam proses perubahan sosial yang terjadi. Dalam gerakan sosial baru, dikenal konsep aktivisme digital yang sederhananya diartikan sebagai keterlibatan aktivisme sosial dalam media digital. Aktor dalam melakukan aktivitas gerakan sosialnya, akan memberdayakan media digital sebagai wadah gerakan sosial.

Merunut pola aktivisme digital, partisipasi politik warga negara sangat terbuka. Ini tentu tidak lepas dari akses kekuasaan dalam struktur kesempatan politik yang mudah. Setiap individu dapat menyebarkan keresahannya terhadap suatu masalah dalam media internet. Hal ini akan menstimulus pengguna internet lainnya untuk merespon permasalahan yang disebarakan oleh pengguna. Pola komunikasi ini berpotensi besar pada upaya membangun jejaring advokasi, di mana terdapat sekelompok orang yang bekerja sama dan bersolidaritas dalam tujuan menyelesaikan permasalahan.

Potensi jejaring ini akan sangat berpengaruh pada kekuatan politik dengan mengacu pada kualitas dan kuantitas individu maupun kelompok yang tergabung di dalamnya. Dalam proses bergabungnya ke dalam jejaring, individu atau kelompok akan memberikan sikap politiknya. Media penyampaian sikap politik ini beragam, bisa melalui kertas posisi, rilis analisis hingga penandatanganan petisi.

Penggunaan media digital dalam aktivitas sosial politik memberikan gagasan baru dalam metodologi gerakan sosial. Media digital memberi inovasi terkait metode gerakan sosial yang sebelumnya digunakan, termasuk petisi. Metode gerakan sosial umumnya merupakan bentuk protes yang dilakukan atas situasi ketidakadilan. Seseorang ataupun kelompok dapat memberikan reaksi yang beragam terhadap fenomena yang terjadi apabila fenomena tersebut dianggap sebagai suatu hal yang keliru dan merugikan masyarakat.

Petisi menjadi alat penyampaian protes individu maupun kelompok terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Petisi sebagai ekspresi politik seseorang maupun organisasi yang terpusat pada satu ruang dengan mengumpulkan sikap-sikap politik lainnya melalui jejaring gerakan. Kelompok masyarakat yang protes akan menyatukan pendapat dengan mereka yang sepakat melakukan protes, lalu kemudian menyatakan sikap untuk melakukan suatu tindakan (Dedi, 2017).

Sikap protes ini tertuang dalam bentuk tandatangan petisi sebagai simbol keterwakilan diri. Lindner & Riehm (2011) mendefinisikan petisi sebagai permintaan kepada otoritas publik, biasanya institusi pemerintahan atau parlemen.

Petisi memiliki tujuan antara lain untuk mengubah kebijakan publik atau mendorong tindakan tertentu oleh institusi public (Simamora, 2017).

Seiring dengan perkembangan ruang publik virtual, di mana proses demokrasi terjalin dalam jejaring internet, protes sosial pun dikomparasikan dengan media virtual. Hal ini tentu tidak lepas dari kelebihan aktivisme digital yang memiliki potensi besar dalam mengkampanyekan protes dengan komunikasi yang luas dan akses yang mudah. Setiap individu dapat tergabung dalam permasalahan dengan opsi klik fitur penandatanganan petisi dan menyebar petisi tersebut. Penyebaran petisi bertujuan memantik keresahan bersama pengguna media yang kemudian melakukan pola yang sama.

Titik tekan petisi daring adalah mencari dukungan sebanyak mungkin agar informasi semakin massif di media. Petisi daring adalah media penghubung antara masyarakat sipil kepada pengambil kebijakan. Setiap petisi yang ditandatangani akan dikirimkan sesuai jumlah penandatanganan melalui *email* kepada tujuan petisi. Selain itu, proses penyebaran petisi akan menggiring opini publik untuk merespon masalah tersebut, termasuk melalui media sosial. Kedudukan petisi daring dalam gerakan sosial adalah varian metode gerakan, dimana dibutuhkan metode gerakan lain yang dapat menunjang pencapaian perubahan yang ingin dicapai, semisal dengan aksi massa, penulisan opini, kampanye kreatif hingga mediasi dengan tujuan.

Di Amerika Serikat, pemerintah memberikan ruang yang cukup besar pada petisi daring sebagai bentuk partisipasi politik warga negara. Platform petisi daring

*We the People* dapat diakses melalui situs *petitions.whitehouse.gov* setelah mendaftarkan diri melalui situs gedung putih. Cara kerja petisi ini adalah dengan mematok target sebesar 100.000 penandatanganan, maka petisi akan mendapatkan respon dari gedung putih. Sebaliknya, jika penandatanganan kurang dari 150 warganet, maka petisi tersebut akan dihapus dari daftar pencarian (*We the People*, 2013).

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa situs yang menyediakan platform petisi daring kepada warganet. Sejauh ini terdapat dua penyedia layanan petisi daring di Indonesia, yaitu *change.org* dan *petisidaring.net*. Dalam perjalanannya, situs *change.org* menjadi penyedia jasa petisi yang cukup populer dan digemari para pegiat aktivisme digital.

### **1. Petisi Daring *Change.org***

*Change.org* merupakan salah satu platform gerakan berbasis petisi daring. Gerakan ini mendapat tempat tersendiri dikalangan warganet. Pengguna *change.org* hingga kini telah mencapai 200 juta orang, yang diakses oleh 196 negara di dunia. Platform petisi online *change.org* menjadi penghubung keresahan masyarakat kepada pemerintah dan pihak swasta. Ini sebagai bentuk menggalang dukungan dan mengkampanyekan masalah untuk melakukan perubahan.

Setiap individu dapat berpartisipasi baik dalam membuat petisi, menandatangani dan menyebarkan petisi untuk menggalang solidaritas dan bentuk kampanye. Pembuat petisi harus menjelaskan terkait topik isu yang dia

angkat untuk mencari dukungan dari masyarakat. Pembuat dituntut untuk lihai menentukan tuntutan dan target orang yang dapat membantu menandatangani petisi. Hal ini dilakukan guna menggalang solidaritas dan memobilisasi massa untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Setiap petisi yang ditandatangani akan dikirim dalam bentuk email ke tujuan petisi sehingga mengefektifkan pesan kepada sasaran baik instansi negara maupun perusahaan. Jika ada ribuan petisi yang telah ditandatangani maka penerima petisi pun akan menerima email dengan jumlah yang sama.

Peran *change.org* disini sebagai pihak yang memediasi keresahan masyarakat kepada instansi terkait sehingga memungkinkan perubahan. Selain itu, *change.org* sangat berkontribusi dalam pengkampanyean masalah sehingga dapat memunculkan keresahan bersama pengguna internet. Setelah menandatangani petisi, biasanya pengguna akan menyebarkan petisi tersebut untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain yang juga bersimpati dalam kasus tersebut. Biasanya penyebaran dilakukan menggunakan media sosial seperti facebook, whatsapp, dan beberapa media lainnya. Posisi change dalam beberapa kasus bukan sebagai media utama, melainkan varian gerakan. Jadi terdapat kombinasi varian gerakan sosial, seperti gerakan demonstrasi atau aksi massa langsung, diskusi atau kajian, gerakan digital dan berbagai varian lainnya.

Hal ini tentu tidak lepas dari posisi *change.org* sebagai media kampanye isu. Melalui pemberitaan media ini perlahan akan berdampak pada



terbangunnya riak-riak gerakan sosial lainnya. Presiden *Change.org* dan COO Jenifer Dulski dalam Isaacson (2014) memberikan rekomendasi kepada pembuat petisi untuk menuliskan narasi terkait dampak masalah tersebut. Selain itu, ada 6 faktor lainnya yang membuat petisi maksimal (Simamora, 2017), yaitu :

1. Mengunggah foto atau video dalam petisi. Ketika petisi menggunakan foto atau video maka petisi tersebut tujuh kali lebih berpeluang berhasil
2. Memilih target petisi yang tepat dengan indikator pengaruh target terhadap isu. Ini untuk memaksimalkan potensi keberhasilan petisi
3. Membangun jaringan dengan individu maupun kelompok, untuk membantu memassifkan penyebaran petisi
4. Permintaan dalam petisi juga harus fokus dan spesifik karena petisi lebih efektif jika dibuat dengan permintaan yang spesifik dan *actionable* atau bisa ditindak lanjuti
5. Pemilihan isu sebaiknya bersifat lokal, karena banyak petisi yang berangkat dari isu lokal yang berhasil diadvokasi
6. Berbicara kepada media. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan media massa dalam gerakan, seperti konferensi pers, penulisan berita dan lain sebagainya

Tolak ukur dari keberhasilan petisi tidak dapat diukur dari jumlah penandatanganan petisi melainkan pada kesadaran masyarakat, dukungan publik

dan penyebaran media yang dapat memantik pola komunikasi intens baik daring maupun luring, dukungan dari aktor politik pembuat kebijakan, perubahan dan penerapan kebijakan lainnya. Tetapi jumlah penandatanganan memiliki pengaruh yang kuat dalam penyebaran informasi kepada media publik dan penegasan sikap politik sebagai wujud partisipasi politik warga negara. Hal yang patut diinsafi bersama bahwa petisi daring bukan hanya media gerakan sosial tunggal, melainkan varian gerakan sosial yang memberikan ruang pada metode gerakan sosial lainnya untuk saling melengkapi metodologi dalam pengawalan isu.

Demi massifnya penginformasian terkait masalah yang diangkat dalam petisi, *change.org* membangun kerjasama dengan jurnalis dan perusahaan media pemberitaan besar, seperti yahoo dan mongabay. *Change.org* Indonesia mengirim press release atau press note melalui email kepada media setiap minggunya untuk memberikan informasi mengenai petisi yang menarik. Upaya tersebut memperoleh respon positif dari media dan rata-rata isu yang dipetisikan dimuat oleh media, khususnya media daring yang dinilai paling responsif karena dapat memproduksi berita dalam waktu yang relatif cepat (Destrity, 2018).

Pembuat adalah warganet yang menginisiasi sebuah petisi daring untuk melakukan sebuah perubahan. Sedangkan partisipan petisi atau disebut penandatanganan petisi merupakan warganet baik secara individu maupun organisasi yang melibatkan dirinya dalam gerakan petisi dengan membantu

menandatangani petisi dan bisa juga disebarluaskan ke khalayak. Dalam studi petisi Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!*, Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS) merupakan penggagas petisi ini. Sedangkan sasaran petisi adalah pemerintah dan tentunya masyarakat umum yang terlibat sebagai partisipan.

Judul dari petisi ini adalah Gunung *Bulu* Bawakaraeng harus segera di *heritage!*. Petisi ini merupakan desakan kepada pemerintah untuk segera memberikan payung hukum dan merekomendasikan status pusaka saujana (*cultural heritage*) kepada Gunung Bulu Bawakaraeng melalui lembaga PBB (UNESCO). Petisi ini telah dibuat sejak tahun 2018. Hingga kini telah ditandatangani oleh 32.924 Partisipan termasuk di dalamnya beberapa komunitas dan tokoh intelektual.

Fokus dari pewartakan gerakan sosial ini adalah mengembalikan fungsi dan kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng sebagaimana mestinya. Untuk melihat sebagaimana mestinya itu, dianggap harus melihat dalam beberapa perspektif atau dengan melihat dengan cara pandang holistik. Dalam narasi yang terjelaskan di petisi ini mencoba menunjukkan keterkaitan sejarah dan budaya yang erat antara Gunung *Bulu* Bawakaraeng dengan masyarakat di sekitarnya sehingga kelestariannya harus tetap dijaga.

Petisi ini memuat tiga tuntutan yang selayaknya dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu memberikan status hukum, melarang aktivitas merusak dan mendukung status *cultural landscape*

*heritage* kepada Gunung Bulu Bawakaraeng. Ketiga tuntutan ini dinilai dapat menjadi alternatif dari masalah yang sedang terjadi di Gunung *Bulu* Bawakaraeng.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Konflik dan gerakan sosial adalah dua hal yang terhubung, layaknya sebab-akibat. Berbagai konflik yang muncul dari berbagai masalah sosial kemudian menghasilkan tindakan-tindakan yang dilakukan beberapa orang dengan tujuan yang sama, ini yang kemudian disebut aksi kolektif konflikual. Singh mendefinisikan aksi kolektif konflikual sebagai usaha kolektif dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, tujuan-tujuan jangka menengah dan nilai-nilai yang dianut bersama, bahkan meski berhadapan dengan penentangan dan konflik (Singh, 2010)

Aksi kolektif konflikual secara garis besar terdiri dari beberapa jenis pola gerakan, jika ditinjau dari pengorganisirannya dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, jenis gerakan yang relatif terorganisir dengan pola-pola tertentu, memiliki tujuan dan biasanya berumur panjang. Contohnya adalah *rebellion*, revolusi dan gerakan sosial. Kedua, jenis gerakan yang kurang terorganisir, relatif muncul secara spontan dan umur gerakan yang pendek. Contoh dari gerakan ini adalah *crowd* dan *riot* (Singh, 2010).

Tetapi dari kelima jenis aksi kolektif konflikual di atas, gerakan sosial merupakan gerakan yang terorganisir, memiliki pencapaian tujuan dan nafas

gerakan. Gerakan sosial menurut Davis (2012) adalah reaksi sekumpulan individu yang tidak puas akan kondisi kehidupan sosial yang terjadi. Terdapat ketamakan hidup yang dapat menyebabkan perpecahan sosial dan mental, maka gerakan sosial ini berkembang untuk menciptakan keharmonisan.

Senada dengan perilaku merusak manusia terhadap gunung. Bagi sebagian kelompok yang memperjuangkan kelestarian alam, merusak alam sama halnya dengan merusak manusia. Oleh karena itu tindakan merusak alam harus dilawan. Demikian halnya petisi yang dibuat oleh FISS di situs *change.org*. Ini muncul sebagai reaksi atas perilaku manusia yang merusak dan tidak tegasnya pemerintah melihat permasalahan di gunung. Tak jarang pemerintah mendukung penempatan gunung sebagai sarana rekreasi-eksploitatif yang berpotensi terdegradasi. Petisi ini mewakili keresahan masyarakat Indonesia atas kerusakan yang dilakukan oleh tangan manusia.

Petisi ini merupakan reaksi dari perilaku destruktif manusia yang berdampak pada kerusakan yang terjadi di Gunung Bulu Bawakaraeng. Perilaku destruktif ini mencakup meninggalkan sampah, penebangan liar, pembakaran hutan dan pembukaan jalur kunjungan. Menyebabkan terjadinya kerusakan fisik diantaranya adalah kerusakan geomorfologi, kerusakan ekologi, kerusakan vegetasi dan habitat, serta kerusakan pada aspek estetika. Sedangkan kerusakan non fisik adalah kerusakan akibat aktifitas-aktifitas yang bertentangan dengan kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Sulawesi, 2019).

Isi dari petisi ini adalah desakan kepada pemerintah untuk segera merekomendasikan payung hukum dan status pusaka saujana (*cultural heritage*) kepada Gunung Bulu Bawakaraeng yang dikeluarkan oleh UNESCO. Petisi ini telah dibuat sejak tahun 2018. Hingga kini telah ditandatangani oleh 32.924 partisipan termasuk di dalamnya beberapa komunitas dan tokoh intelektual.

Adapun mekanisme penggunaan petisi daring, terdapat dua peran yang diambil oleh pengguna *change.org*, yaitu pembuat dan partisipan petisi. Masing-masing dari peran ini memiliki fungsinya dan tentunya saling melengkapi satu sama lain. Kedua elemen ini akan menjadi informan penelitian sesuai dengan posisinya. Pertanyaan dan pencarian informasi akan mengacu pada proses gerakan sosial petisi daring dan dampak penggunaan petisi daring dari sudut pandang pembuat dan partisipan petisi.

Pembuat petisi sebagai pihak yang memulai gerakan petisi, melalui wacana isu yang disampaikan kedalam petisi tersebut. Dalam penentuan tema petisi, pembuat akan mempertimbangkan penentuan isu yang akan digiring kedalam petisi. Hal ini sangat vital, mengingat bahwa hal pertama yang partisipan lihat dari petisi adalah isu yang diangkat. Namun sebelum sampai pada pembuatan petisi, tentu terdapat alasan dan motif dari pembuat petisi sehingga menggunakan media daring sebagai metode gerakannya. Ini juga untuk mengetahui pandangan pembuat terkait pola gerakan sosial dan sinkronisasi dari gerakan sosial langsung dan gerakan sosial media digital.

Penulisan narasi dalam petisi yang nantinya akan dikirim ke email tujuan, memainkan peran vital sebagai alat propaganda. Oleh karena itu, gaya penulisan akan sangat berpengaruh terhadap psikologi pembaca, terutama berkaitan dengan tindakan menandatangani dan menyebarkan petisi. Pola penyebaran petisi pun juga dilakukan dengan metode yang beragam, baik menggunakan media sosial hingga melakukan donasi kepada pihak change untuk membantu penyebaran informasi. Penyebaran petisi merupakan upaya kampanye virtual untuk mendapatkan bantuan partisipan menandatangani petisi dan penyebaran informasi dari media massa.

Selain itu, partisipan memiliki peran kunci terhadap kekuatan petisi daring tersebut. Jumlah penandatanganan petisi akan sangat berpengaruh terhadap kekuatan politik petisi. Semakin banyak partisipan penandatanganan, semakin besar potensi petisi akan direspon tujuan. Maka dari itu, partisipan harus memahami tindakannya untuk terlibat menandatangani petisi tersebut, ini yang kiranya perlu ditelusuri lebih dalam. Potensi kekuatan petisi berbeda satu sama lain, baik dari jumlah hingga menjadi *trending information* di masyarakat. Jenis isu yang diangkat, akan mempengaruhi jumlah dan penyebaran informasinya. Namun, isu bukan hanya satu faktor, di era perkembangan teknologi, determinisme faktor akan sangat sulit ditemui.

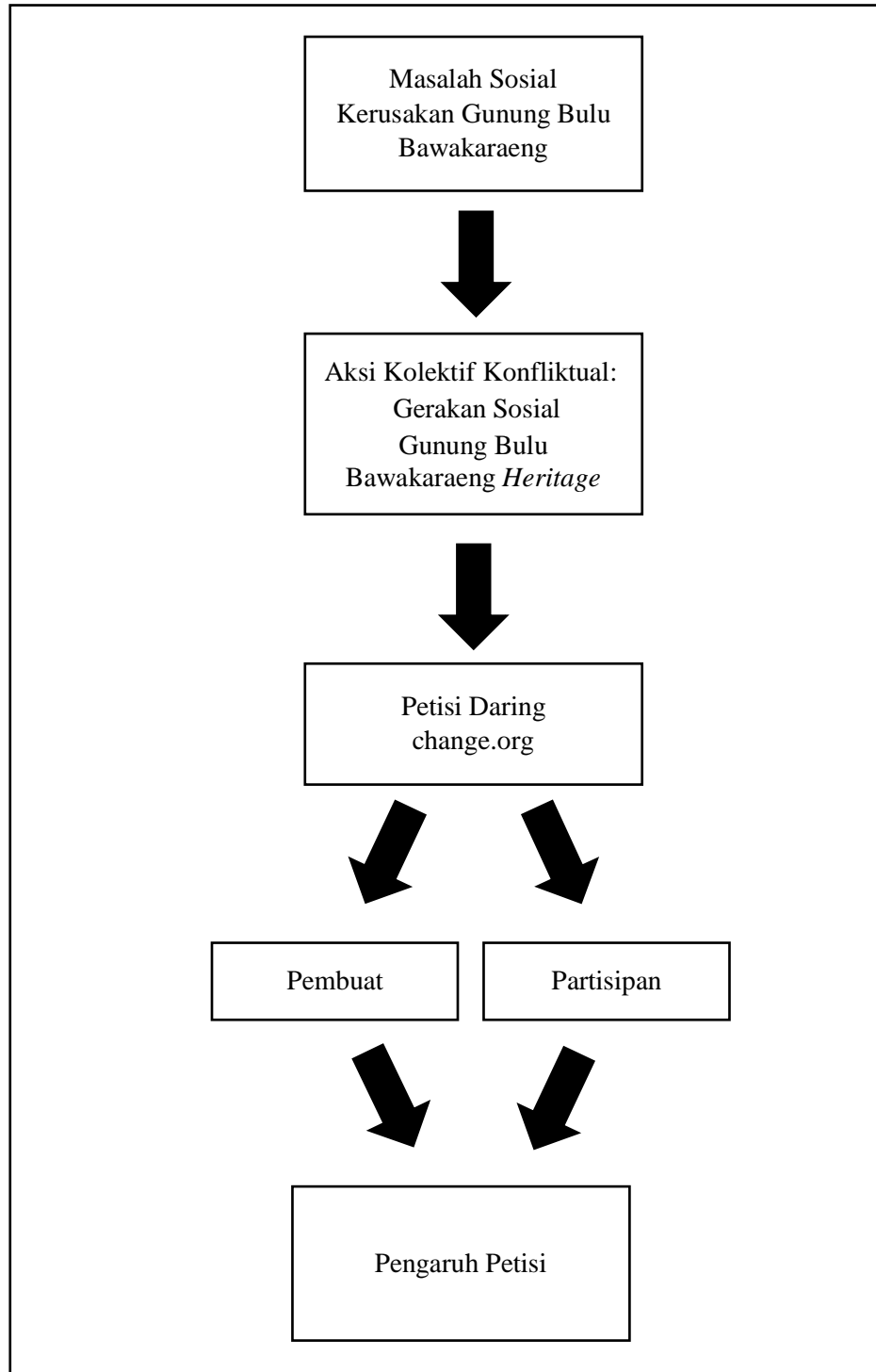
Sebagaimana metode gerakan sosial lainnya, tentu petisi daring bukan hanya sebagai instrumen gerakan tunggal. Dibutuhkan komparasi dengan varian gerakan lainnya untuk memassifkan pewacanaan. Setelah terbentuk kesadaran partisipan akan permasalahan yang diangkat, perlu ditelusuri lebih dalam terkait metode lain

yang digunakannya. Dari sini, dapat dilihat bagaimana partisipan memandang petisi daring sebagai varian metode gerakan sosial dan sejauh mana proses pengawalan isu tersebut.

Proses penyebaran petisi daring tentu memberikan dampak terkait permasalahan yang diangkat dalam petisi tersebut. Ini juga untuk mengetahui perkembangan petisi dan menganalisis pengaruh dari proses ke dampaknya. Dampak yang bisa ditimbulkan adalah perubahan kebijakan, adanya ruang yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk peninjauan petisi, jumlah partisipan yang bersolidaritas, kampanye yang massif dan riak-riak gerakan lainnya. Martin dan Kracher (2008) memberikan kerangka evaluatif dari keberhasilan petisi daring. Kerangka evaluative ini terdiri dari dua tingkat, yaitu *Ultimate* dan *intermediate*. *Ultimate* menjelaskan bahwa taktik protes daring dapat disebut berhasil jika mencapai tujuan akhir yaitu mendorong perubahan/change dalam kebijakan atau praktik, sedangkan *intermediate* menjelaskan bahwa walaupun taktik protes daring tidak mengubah dan memberikan dampak, taktik protes daring dapat disebut berhasil jika mencapai tujuan *intermediate* yaitu menangkap perhatian/*awareness* pemimpin atau pembuat kebijakan (Simamora, 2017)



Gambar. 2.1 Kerangka Konseptual



## E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul	Referensi dan Metode	Hasil Penelitian
Muhammad Dedi (2017)	Pengorganisasian gerakan sosial berbasis petisi daring (studi kasus : pengguna <i>change.org</i> Indonesia chapter)	Jurnal Informasi UI. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif	<i>Change.org</i> sebagai penyedia layanan petisi daring merupakan suatu bentuk protes yang terjalin dalam ruang digital. Protes sosial merupakan reaksi dari kebijakan yang dianggap keliru sehingga memunculkan kolektifitas aktor yang melakukan tindakan yang sama. Pola pengorganisasian terletak pada jaringan sosial antara sesama pengguna <i>change.org</i>
Rahma Simamora (2017)	Petisi Daring sebagai alat advokasi kebijakan : Studi kasus <i>change.org</i> Indonesia Periode 2015-2016	Jurnal Komunikasi Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif	Petisi daring sebagai alat advokasi kebijakan yang juga mencakup sifat, bentuk, fungsi, aktivitas, tidaktik dan penyampaian pesan juga kerangka evaluasi advokasi kebijakan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan petisi daring
Galih Puji Mulyoto, Galih Puji Mulyadi. (2017)	Petisi daring sebagai modal sosial (studi fenomenologi situs <i>www.change.org</i> pada tahun 2015	Jurnal Pancasila dan Kewarganegeraan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif	<i>Change.org</i> membangkitkan semangat demokrasi partisan serta menghasilkan agensi subyek. Teks – teks yang diproduksi oleh pengguna menciptakan tindakan kolektif dengan membangun kedekatan

		Metode	dan kesamaan nasib antar pengguna merupakan indikasi sebagai harapan baru untuk modal sosial di era digital. Selain itu, petisi daring sebagai transformasi perjuangan baru masyarakat terhadap kebijakan publik/korporasi yang bertentangan dengan keadilan sosial.
--	--	--------	--

Terdapat beberapa hasil karya ilmiah yang berkaitan erat dengan fokus penelitian ini, garis besar yang coba dibatasi adalah gerakan sosial dan *change.org*. Muhammad Dedi (2017) mencoba melihat posisi *change.org* sebagai bentuk pengorganisasian gerakan sosial berbasis media virtual. Garis besar yang coba dipandanginya adalah kehadiran *change* sebagai media protes sosial pengguna terkait suatu masalah yang terjadi. Protes sosial merupakan reaksi dari kebijakan yang dianggap keliru sehingga memunculkan kolektifitas aktor yang melakukan tindakan yang sama. Pola pengorganisasian terletak pada jaringan sosial antara sesama pengguna *change.org*.

Dedi (2017) memasukkan petisi daring sebagai sebuah bentuk gerakan sosial, meski diakuinya bahwa gerakan ini sangat temporal. Disini letak perbedaan dengan fokus gerakan sosial dalam skripsi ini, bahwa petisi hanya salah satu metode gerakan yang digunakan oleh kelompok struktural dalam sebuah gerakan sosial. Kehadiran petisi bukanlah sebagai media utama, melainkan pendukung protes sosial dan penggaet dukungan masyarakat.

Kemudian, karya ilmiah kedua merupakan tinjauan dari penggunaan petisi daring sebagai alat advokasi kebijakan. Rahma Simamora (2017) mengategorikan petisi daring ke dalam beberapa fokus kecil yang dimulai dari sifat, bentuk, fungsi, aktivitas, taktik dan penyampaian pesan *change.org*. Taktik dari petisi daring akan berkaitan erat dengan ukuran keberhasilannya. Dalam metode evaluasi petisi daring, terdapat dua tingkatan evaluasi, yaitu *Ultimate* dan *intermediate*. *Ultimate* menjelaskan bahwa taktik protes daring dapat disebut berhasil jika mencapai tujuan akhir yaitu mendorong perubahan dalam kebijakan atau praktik, sedangkan *intermediate* menjelaskan bahwa walaupun taktik protes daring tidak mengubah dan memberikan dampak, taktik protes daring dapat disebut berhasil jika mencapai tujuan *intermediate* yaitu menangkap perhatian pembuat kebijakan (Simamora, 2017). Keberhasilan petisi dalam tahap *intermediate* sangat dipengaruhi oleh intensitas dan varian metode gerakan lainnya.

Konsep evaluasi petisi juga digunakan penulis dalam melihat perkembangan pemanfaatan petisi Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!*. Perbedaan mendasar adalah kehadiran petisi yang dilihat Simamora (2017) sebagai metode advokasi kebijakan. Sedangkan dalam skripsi ini, petisi dilihat dalam progressnya dengan gerakan sosial. Bahwa petisi daring tak hanya digunakan sebagai advokasi kebijakan semata, lebih dari itu petisi dapat digunakan sebagai metode gerakan sosial baru, dimana terdapat bentuk resistensi terhadap kelompok yang mendominasi, termasuk pemerintah.

Penelitian Mulyoto dan Mulyadi (2017) mencoba melihat keterkaitan antara partisipasi politik petisi daring dan modal sosial. Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber (*resource*) yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Modal sosial terdiri dari 3 bagian, yaitu kepercayaan, nilai dan jaringan. Ketiga hal ini yang menguatkan integrasi suatu kelompok, terlebih jika menyikapi suatu permasalahan. Petisi daring dapat membangkitkan ketiga modal sosial diatas melalui partisipasi politik masyarakat luas yang merupakan respon dari pembuatan petisi oleh individu. Kehadiran petisi daring yang dibuat oleh pembuat petisi berhasil membangun kepercayaan, nilai dan jaringan dari partisipan petisi daring.

Mulyoto dan Mulyadi (2017) mendudukan modal sosial petisi daring sebagai kekuatan untuk melakukan perlawanan terhadap kebijakan publik/korporasi yang bertentangan dengan keadilan sosial. Perbedaan dengan skripsi ini adalah penekanan pada kelompok masyarakat yang terlibat dalam gerakan sosial ini, yang mewujud dalam media baru. Selain itu, terdapat fokus permasalahan yang penulis angkat, yaitu isu degradasi lingkungan sebagaimana kerusakan yang terjadi di Gunung Bulu Bawakaraeng.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Merunut kajian ilmu sosial, terdapat beberapa pemikiran yang melahirkan metodologi penelitian sebagai pengujian ilmiah. Ritzer (2013) membagi paradigma sosiologi dalam tiga paradigma besar, paradigma fakta sosial, defenisi sosial dan perilaku sosial. Setiap paradigma memiliki garis metode penelitiannya sendiri sebagai pengkajian realitas sosial. Paradigma fakta sosial menurunkan penelitian kuantitatif, berdasarkan pada sosiologi makro. Paradigma defenisi sosial yang sarat akan intrepretatif dari tindakan sosial menerapkan penelitian kualitatif. Sedangkan paradigma perilaku sosial, meski mengambil sebagian metode kuesioner, mengkombinasikannya dengan metode eksperimen.

Bungin (2015) melacak perkembangan tradisi pemikiran sosiologi dalam dua tradisi besar, tradisi pemikiran Prancis juga Inggris dan tradisi pemikiran Jerman. Dua tradisi pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Tradisi pemikiran Inggris dan Prancis dikenal dengan positivismenya. Aliran ini mengacu pada pandangan Aristotelian yang cenderung materialis. Metode yang digunakan dalam pandangan saintifik ini menggunakan penelitian kuantitatif yang terukur dan makro. Sedangkan dalam tradisi pemikiran Jerman dipengaruhi oleh pandangan Platonik yang idealis dan humanis. Pandangan ini melihat bahwa sejarah manusia merupakan manifestasi dari perjalanan sejarah ide-ide dan kreasi manusia sebagai makhluk sadar dan bertujuan. Ide dan makna yang mendasari tindakan sosial kemudian melahirkan penelitian kualitatif.

## **A. Tipe dan Dasar Penelitian**

Sugiyono (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Penelitian kualitatif memiliki beberapa varian metode tersendiri, mulai dari studi etnografi, studi *grounded*, studi *life history*, observasi partisipan, dan studi kasus. Robert Yin mendefinisikan studi kasus sebagai suatu inkuiri empiris yang: menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas; dan dimana: multi sumber bukti dimanfaatkan (Bungin, 2015). Studi kasus berupaya untuk mengkaji fenomena sosial secara khusus, akurat dan detail.

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, metode penelitian kualitatif digunakan sebagai metodologi dengan studi kasus untuk fokus metode kualitatif. Hal ini tidak lepas dari upaya untuk mengkaji lebih dalam pola aktivisme digital pengguna petisi daring di Kota Makassar, terkhusus juga pada masalah lingkungan seperti yang sedang diperjuangkan untuk Gunung Bulu Bawakaraeng. Petisi daring belakangan ini semakin massif digunakan para pegiat gerakan sosial.

Ini tentu merupakan hal yang menarik jika melihat motif, proses hingga dampak dari petisi daring tersebut. Akses media digital yang mudah, penyebaran informasi yang massif dan kebutuhan interaksi sosial menjadikan media digital sebagai pilihan warganet menggunakan media internet.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi dan *setting* penelitian selain dibingkai dalam kerangka teoritis juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional (Bungin, 2015). Untuk itu, lokasi dan *setting* penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam.

Berangkat dari judul penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan mengambil fokus sasaran penelitian pada organisasi Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS). Pertimbangan dalam penentuan lokasi ini adalah letak dan berkembangnya isu Gunung Bulu Bawakaraeng *heritage* oleh kelompok FISS.

### **2. Waktu Penelitian**

Penentuan waktu dalam penelitian merupakan bentuk dari manajemen penelitian. Umumnya penentuan waktu akan mengikuti situasi kondisi dan kesiapan peneliti untuk melakukan pengambilan data lapangan. Penelitian ini berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember 2019.



### C. Teknik Penentuan Informan

Penelitian kualitatif memfokuskan informasi berdasarkan pada suatu fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menggunakan bahasa populasi untuk menggeneralisir jumlah dan luas area, melainkan memfokuskan pada fenomena sosial. Dalam penentuan informan, penelitian kualitatif tidak melihat dari berapa jumlah sampel yang diambil, melainkan menentukan informan yang menjadi sumber informasi dari fenomena yang diketahuinya. Prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian (Bungin, 2015).

Guna menemukan informan kunci dalam fenomena sosial ini maka teknik *purposive sampling* digunakan sebagai teknik penentuan informan. Penggunaan *purposive sampling* adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan detail dari informan yang telah mencukupi kriteria tertentu. Penelitian ini mengumpulkan informasi data dari keterlibatan individu dalam gerakan sosial Gunung Bulu Bawakaraeng *heritage* yang juga merupakan pengguna *change.org*.

Pengguna petisi daring ini dikategorikan dalam dua jenis, yaitu pembuat dan partisipan petisi. Pembuat petisi adalah individu maupun kelompok yang menginisiasi petisi ini. Sedangkan partisipan adalah individu atau kelompok yang berada diluar bagian pembuat petisi dan terlibat dalam penandatanganan petisi tersebut. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah pembuat petisi yaitu

Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS) dan partisipan petisi yaitu khalayak yang berpartisipasi dalam petisi ini yang semuanya berjumlah 9 orang.

Dalam internal pembuat petisi dalam hal ini kelompok FISS, dipilih 6 orang informan kunci, di antaranya aktor-aktor gerakan yang berkontribusi dalam gerakan ini. Penentuan informan ini didasarkan pertimbangan kontribusi dan kapasitas aktor tersebut dalam gerakan ini. Pembagiannya antara lain; informan yang memiliki pengaruh karena pengetahuan dan pemahaman akan nilai yang terbangun pada gunung Bulu Bawakaraeng; dan informan yang bertanggung jawab secara struktural di organisasi FISS. Sedangkan, dalam partisipan petisi, dipilih 3 partisipan secara acak sesuai dengan keterlibatannya di petisi ini. Meski dalam perkembangannya, informan yang diambil secara acak ini juga memiliki pemahaman keilmuan yang menunjang wacana ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa metode dasar yang terdiri dari dua jenis data yang diperoleh dari metode tadi, yaitu data primer dan data sekunder. Dalam data primer, data didapatkan langsung dari sumber data melalui metode observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder seperti pengumpulan informasi menggunakan berbagai literatur terkait untuk menunjang keabsahan skripsi ini.

## 1. Data Primer

Observasi awal yang dilakukan peneliti adalah mengamati pola penggunaan petisi daring yang dilakukan oleh kelompok FISS dan partisipan dalam gerakan sosial Gunung Bulu Bawakaraeng *heritage*. Pengamatan awal memberikan gambaran umum terkait penggunaan petisi daring dan dinamika gerakan sosial ini. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat langsung berbagai aktifitas yang dilaksanakan oleh kelompok FISS selaku pembuat petisi, termasuk menyambangi lokasi aktifitas keseharian, hingga mengikuti kegiatan formal yang dilaksanakan. Kegiatan formal ini seperti seminar yang dibuat oleh FISS sebagai bentuk kampanye, pada bulan Desember 2019. Observasi ini dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2019. Terhadap partisipan petisi, peneliti melakukannya dengan mengamati perkembangan petisi dengan mengamati jumlah penandatanganan, komentar dan penyebaran petisi.

Di sela melaksanakan observasi, peneliti juga turut melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada kelompok FISS. Proses wawancara dilakukan dengan melaksanakan diskusi kepada setiap aktor yang dianggap memiliki kapasitas untuk diwawancarai. Wawancara dilakukan secara bertahap, dimulai dari mencari data terkait pemahaman ekologi, struktur gerakan, ideologi gerakan hingga proses pemanfaatan petisi. Sedangkan, wawancara dengan partisipan petisi dilaksanakan dengan berdiskusi langsung melalui ruang fisik dan media digital.

## **2. Data Sekunder**

Pengumpulan data sekunder dilaksanakan melalui menggali informasi dan referensi terkait gerakan petisi *change.org* dan permasalahan degradasi lingkungan yang terjadi dalam waktu belakangan ini. Adapun bahan-bahan literatur terkait yaitu buku, skripsi, jurnal, artikel ilmiah, berita, hingga selebaran informatif.

### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian Kualitatif, analisis data dilakukan dari masa pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan dari data yang telah ditemukan. Untuk menarik kesimpulan dari data hasil penelitian, maka analisis deskriptif digunakan. Analisis data deskriptif berusaha menjelaskan dan menggambarkan hasil temuan data dari proses wawancara. Teknik analisis data berjalan dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam proses analisis data, awalnya dilakukan proses reduksi data untuk merangkum dan mengelompokkan temuan inti dari data wawancara. Reduksi data bertujuan untuk memilih dan mengelompokkan temuan data penting yang relevan dengan penelitian. Setelah reduksi data selesai dilakukan, lanjut ke tahap penyajian data. Hasil data yang telah disusun tadi kemudian akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Ini untuk memberikan gambaran hasil penelitian tadi dan memudahkan peneliti untuk menyimpulkan penelitian tersebut. Dari penarasian ini kemudian data akan disimpulkan sebagai hasil analisis data tersebut.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Forum Intelektual Selatan Sulawesi

Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS) merupakan organisasi yang menginisiasi lahirnya gerakan petisi Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!*. Hal ini juga tentu tak lepas dari pola gerakan yang difokus anggota-anggota FISS yang sebelumnya juga telah terlibat dalam memperjuangkan status Gunung Bulu Bawakaraeng. Gerakan ini merupakan refleksi dari kerusakan yang terjadi di Gunung Bulu Bawakaraeng. Terlebih lagi pada 2004 silam, gunung ini pernah mengalami longsor yang cukup besar. Kondisi tanah yang dianggap belum stabil sewaktu-waktu dapat mengakibatkan longsor susulan, apabila manusia tak faham kedudukan dan berperilaku yang sesuai dengan kodrat gunung tersebut.



Gambar 4.2 Logo FISS (Dokumen Organisasi FISS, 2020)

#### 1. Proses Pembentukan

Sebagaimana wadah gerakan sosial pada umumnya, terdapat proses dinamika dalam pembentukannya. Termasuk membicarakan visi misi gerak, arah perjuangan,

paradigma gerakan hingga rencana jangka pendek-panjang organisasi. Demikian halnya yang terjadi dalam proses pembentukan Forum Intelektual Selatan Sulawesi yang kemudian disingkat FISS. FISS merupakan forum pendidikan dan lingkungan yang digagas di kampus Universitas Fajar Makassar. Deklarasinya berlangsung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin pada 27 Mei 2018.

Awal pembentukan FISS dimulai dengan pertemuan beberapa individu setelah kegiatan yang diadakan, untuk membicarakan pentingnya membentuk forum gerakan yang konsen ke masalah pendidikan dan lingkungan. Forum gerakan ini diharapkan mampu menjadi pionir yang menghimpun seluruh pihak yang memiliki kesamaan visi dan misi melihat sesuatu hal.

Selain itu, isu terkait kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng dianggap masih terbatas di kalangan komunitas pecinta alam saja. Keterbatasan akses masyarakat terhadap masalah yang terjadi menjadikan isu ini cenderung eksklusif. Sehingga dari pendiskusikan dan persiapan digagaslah ide untuk membentuk wadah gerakan masyarakat umum yang hendak memperjuangkan permasalahan ini.

Kehadiran petisi dalam gerakan sosial ini menjadi salah satu metode gerakan yang digunakan untuk berbagai tujuan. Petisi dianggap sebagai bentuk protes sosial yang dilakukan sekelompok orang untuk menekan pemerintah atau pihak lainnya. Lindner & Riehm (2011) mendefinisikan petisi sebagai permintaan kepada otoritas publik, biasanya institusi pemerintahan atau parlemen. Petisi memiliki tujuan antara lain untuk mengubah kebijakan publik atau mendorong tindakan tertentu oleh institusi public (Simamora, 2017).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, petisi yang dibuat FISS merupakan bentuk tekanan politik kepada dua pihak. Pertama pihak pemerintah untuk segera memberikan status hukum kepada Gunung Bulu Bawakaraeng dan merekomendasikan status hukum *heritage* yang dikeluarkan oleh UNESCO. Kedua, petisi ini menjadi upaya untuk mengingatkan kepada khalayak publik untuk lebih memperhatikan Gunung Bulu Bawakaraeng dan juga menghindari perilaku merusak lainnya.

FISS sejauh ini telah mengeluarkan dua buah petisi yang memiliki substansi yang sama namun dalam media yang berbeda. Petisi yang dibuat secara cetak maupun secara daring di situs *change.org*. Namun berbeda dengan gerakan sosial pada umumnya yang memilih petisi setelah memiliki wadah gerakan, FISS malah sebaliknya. Petisi yang dibuat FISS mulai dijalankan bersamaan dengan deklarasi organisasi ini.

Namun, penggarapan petisi telah lama dipersiapkan. Kehadiran petisi dianggap penting sebagai instrumen gerakan sosial. Petisi juga kerap kali digunakan ketika hendak melaksanakan kegiatan ataupun penginformasian kepada pihak pemerintah terkait jumlah penandatanganan petisi yang berkembang hingga detik ini.

## **2. Struktur Gerakan**

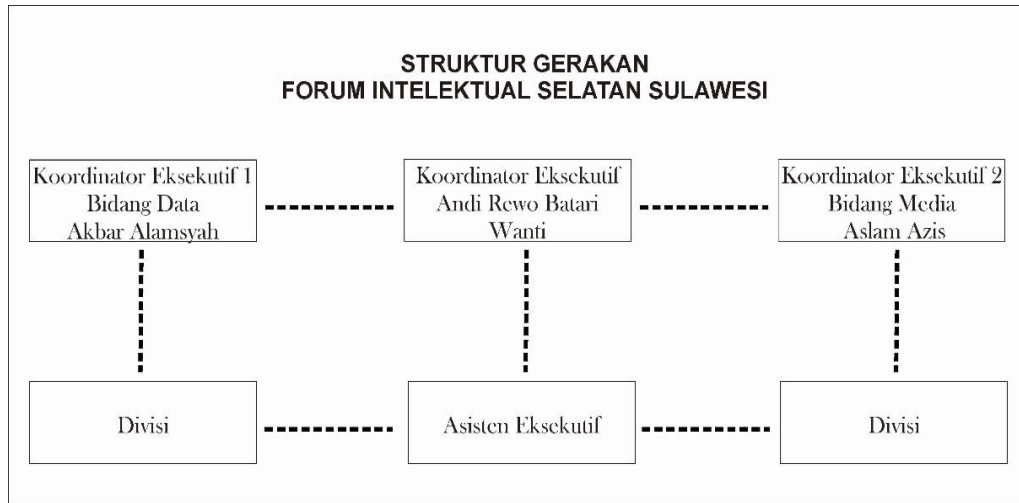
Sebagaimana organisasi gerakan pada umumnya, FISS tentu memiliki struktur geraknya. Hal ini tentu tak lepas dari kebutuhan dan arah gerak yang diinginkan. Setiap elemen dalam struktur organisasi akan diarahkan pada tujuan organisasi.

Aktor dalam struktur pun diberikan peran-peran tersendiri untuk memudahkan pembagian kerja dalam organisasi. Keterlibatan aktor dalam gerakan sangat penting untuk menjamin kontinuitas gerakan. Kolektifitas dibutuhkan untuk menjaga ritme gerakan, apalagi jika gerakan memiliki capaian yang cukup besar.

Sebagai sebuah gerakan sosial baru, aktor gerakan mencari identitas dan pengakuan melalui aksi ekspresif, melalui tuntutan universalistik dan tak dapat ditawar. Semuanya itu harus dijalani melalui partisipasi langsung berarti pada rentang yang sama para aktor tersebut sudah membangun dan mengakui kolektivitas (seperti perserikatan dan partai-partai politik) dan secara umum menghampiri penggunaan rasionalitas instrumental strategis (sebagaimana diajukan oleh paradigma mobilisasi sumber daya sebelumnya). Partisipasi langsung para aktor pada rentang yang sama mengakui kolektivitas berarti hasilnya tuntutan mereka bisa dinegosiasikan dan karakter partisipasinya jadi terwakilkan dan lebih representasional (Rusmanto, 2013).

Demikian halnya dengan yang berlaku dalam pengorganisasian di internal FISS. Struktur gerakan di FISS sendiri terbilang egaliter dan partisipatif. Setiap individu ditetapkan sesuai kemampuan dan kemuannya. Ikatan yang terbangun di setiap individu adalah emosional dan kesadaran. Dalam artian kedekatan emosional yang terbangun di setiap individu dan juga kesamaan ideologi gerak memandang permasalahan ini. FISS tak melakukan proses kaderisasi formal layaknya organisasi kemahasiswaan. Setiap individu yang hendak terlibat dalam gerakan ini boleh memberikan kontribusinya.





Gambar 4.3 Struktur Organisasi FISS (Wawancara Rewo, 1 Desember 2019)

Dalam struktur Gerakan di FISS, pola yang terbangun adalah Egaliter dan kolektif. Artinya proses komunikasi bersifat koordinasi antara koordinator dan divisinya, begitu juga koordinator dengan asisten eksekutif. Pola garis putus-putus menandakan hubungan koordinasi antara setiap yang terhubung. Selain itu, tak menutup kemungkinan peran lain dapat diisi oleh koordinator ataupun yang lainnya, ini yang diistilahkan dengan kolektif.

Masing-masing aktor dalam struktur memiliki peran tersendiri. Seperti fungsionaris inti organisasi, disini terdapat Koordinator yang diwakili oleh dua wakil koordinator. Masing-masing wakil koordinator membidangi dua area gerakan, yaitu internal dan eksternal. Koordinator 1 membidangi data, dengan membawahi divisi riset dan pendidikan. Sedangkan koordinator 2 membidangi media dengan membawahi divisi media dan propaganda.

### 3. Ideologi Gerak

Sebelum masuk kepada paradigma gerakan yang digunakan FISS sebagai landasan gerak. Ada baiknya jika terlebih dahulu menjelaskan terkait definisi paradigma. Menurut Friedrichs, paradigma adalah “suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan (*subjek matter*) yang semestinya dipelajari (*a fundamental image a dicipline has of its subjek matter*)” (Ritzer, 2011, hal. 6). Sederhananya menurut Ritzer (2011, hal. 7), “Paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan (*dicipline*)”.

Thomas Kuhn melihat perkembangan ilmu pengetahuan dipengaruhi oleh paradigma yang digunakan. Perkembangan setiap paradigma yang berlaku berlangsung secara revolusi (Ritzer, 2011). Dalam setiap paradigma yang berlaku, kemungkinan akan terdapat penyimpangan-penyimpangan. Ketika penyimpangan ini mencapai titik krisis, di sini paradigma baru akan muncul untuk menggantikan cara pandang paradigma yang lama. Kehadiran paradigma baru ini diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi paradigma sebelumnya.

Permasalahan yang terjadi terhadap Gunung Bulu Bawakaraeng merupakan tindakan manusia yang dianggap bermula akibat kesalahan memandang makhluk lain diluar dirinya. Paradigma yang digunakan dalam melihat gunung cenderung memposisikan gunung sebagai objek eksploitasi. Gunung dianggap sebagai objek

pemuas hasrat manusia. Akibatnya terjadi perilaku merusak yang massif dan terpola.

Permasalahan yang muncul akibat cara pandang manusia memposisikan sesuatu hal diluar dirinya harus pula dibenahi dengan cara pandang baru yang memiliki pendekatan berbeda. Paradigma lama yang menggunakan pola subjek-objek telah melahirkan kerusakan dan eksploitasi terhadap lingkungan. Maka dari itu, sebagaimana perkembangan dialektis paradigma yang telah Ritzer (2011) gambarkan, harus ada paradigma baru yang menjadi rujukan menyelesaikan permasalahan yang ditinggalkan oleh kegagalan paradigma lama. Paradigma baru ini disebut *neo-paradigm* atau paradigma kepercintaalaman.

*Neo-paradigm* atau disebut paradigma kepercintaalaman merupakan paradigma yang memposisikan manusia dan sekitarnya adalah subjek. Dalam hal ini, relasi yang terbangun adalah relasi intersubjektif. Relasi intersubjektif sederhananya adalah relasi yang berusaha memahami subjek lain diluar dirinya dengan memposisikan dirinya sebagai subjek tersebut.

Paradigma Baru atau disebut juga dengan paradigma kepercintaalaman merupakan cara pandang keilmuan melihat segala sesuatu hal, termasuk lingkungan hidup. Paradigma ini menekankan pada harmonisasi hubungan antara Tuhan, alam dan manusia sebagai entitas yang terhubung. Paradigma kepercintaalaman dijadikan sebagai rujukan ilmiah untuk memahami posisi manusia dan gunung sebagai sesama mahluk yang harus saling memahami satu

sama lainnya. Dalam arti sempit bahwa paradigma kepecintaalaman dijadikan sebagai ideologi gerakan sosial merespon kerusakan lingkungan yang terjadi.

## **B. Petisi Daring *change.org***

*Change.org* merupakan salah satu situs penyedia layanan petisi daring yang digagas untuk memperjuangkan perubahan sosial yang diinginkan oleh pembuat dan penyebar petisi. Media ini telah menghubungkan lebih dari 200 juta orang dari 196 negara dengan klaim telah memenangkan 33.742 kasus di berbagai negara. Situs web ini awalnya diluncurkan oleh Ben Rattray pada 7 Februari 2007. Gagasan ini terfikirannya setelah adiknya diperlakukan sewenang-wenang, sehingga terbesit dibenaknya jikalau mungkin banyak orang yang bernasib sama seperti adiknya. Ide ini kemudian yang mendasari niatnya membuat blog sebagai platform gerakan digital, bersama dengan seorang kawannya. Awalnya, konten dari blog ini cukup beragam, mulai dari kampanye, penggalangan dana hingga petisi. Blog ini yang kemudian bertransformasi menjadi *change.org*, media platform gerakan petisi daring (Hamid, 2014).

Di Indonesia sendiri, Change Indonesia berdiri pada 4 Juni 2012 yang digagas oleh Usman Hamid selaku Direktur Kampanye dan Arief Azis sebagai mantan direktur komunikasi *change.org* Indonesia. Usman Hamid (2014) menuturkan

Sejak 4 Juni 2012, situs ini telah tersedia dalam bahasa Indonesia. Saya, yang sebelumnya intens berkomunikasi dengan direktur *change.org* global, ditunjuk menjadi direktur kampanye Indonesia. Saya segera membentuk tim untuk mencari formula agar bisa membawa platform yang luar biasa ini menjadi

terdaya di tangan aktor-aktor perubahan yang ada di Indonesia. (Hamid, 2014, hal. 138)

Setiap individu dapat berpartisipasi baik dalam membuat petisi, menandatangani dan menyebarkan petisi untuk menggalang solidaritas dan bentuk kampanye. Pembuat petisi harus menjelaskan terkait topik isu yang dia angkat untuk mencari dukungan dari masyarakat. Pembuat dituntut untuk lihai menentukan tuntutan dan target orang yang dapat membantu menandatangani petisi. Hal ini dilakukan guna menggalang solidaritas dan memobilisasi massa untuk mencapai perubahan sosial yang diinginkan. Setiap petisi yang ditandatangani akan dikirim dalam bentuk email ke tujuan petisi sehingga mengefektifkan pesan kepada sasaran baik instansi negara maupun perusahaan. Jika ada ribuan petisi yang telah ditandatangani maka penerima petisi pun akan menerima email dengan jumlah yang sama.

Peran *change.org* disini sebagai pihak yang memediasi keresahan masyarakat kepada instansi terkait sehingga memungkinkan perubahan. Selain itu, *change* sangat berkontribusi dalam pengkampanyean masalah sehingga dapat memunculkan keresahan bersama. Setelah menandatangani petisi, biasanya pengguna akan menyebarkan petisi tersebut untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain yang juga bersimpati dalam kasus tersebut. Biasanya penyebaran dilakukan menggunakan media sosial seperti facebook, whatsapp, dan beberapa media lainnya. Posisi *change* dalam beberapa kasus bukan sebagai media utama, melainkan varian gerakan. Jadi terdapat kombinasi varian gerakan sosial, seperti

gerakan demonstrasi atau aksi massa langsung, diskusi atau kajian, gerakan digital dan berbagai varian lainnya.

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah pengguna *change.org* dari sebelumnya di tahun 2017 berjumlah 4.060.000 pengguna, di tahun 2018 kemarin naik menjadi 6.500.000 pengguna. Kenaikan jumlah pengguna ini cukup memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan partisipasi politik masyarakat menggunakan media digital, terkhusus juga pada popularitas petisi *change.org*. Change Indonesia juga mengklaim telah berhasil memenangkan 7 kasus besar melalui penyebaran petisi dengan jumlah penandatanganan 2 juta pengguna. Dari 6 kategori isu yang populer di petisi *change.org*, isu lingkungan menjadi isu yang paling banyak direspon oleh pengguna *change.org* dengan jumlah keterlibatan mencapai 2.112.128 pengguna (Change.org, 2018).

Di Makassar sendiri terdapat 94 hasil pencarian petisi daring, baik itu merupakan isu kota Makassar maupun yang berkaitan dengannya (Change.org, 2018). Salah satunya petisi yang cukup hangat diperbincangkan adalah petisi Gunung Bulu Bawakaraeng harus di *heritage*. Petisi ini merupakan reaksi dari pola pikir dan perilaku desktruktif manusia yang berdampak pada kerusakan yang terjadi di Gunung Bulu Bawakaraeng.

Perilaku desktruktif ini mencakup meninggalkan sampah, penebangan liar, pembakaran hutan dan pembukaan jalur pendakian. Menyebabkan terjadinya kerusakan fisik diantaranya adalah kerusakan geomorfologi, kerusakan ekologi, kerusakan vegetasi dan habitat, serta kerusakan pada aspek estetika. Sedangkan

kerusakan non fisik adalah kerusakan akibat aktifitas-aktifitas yang bertentangan dengan kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Sulawesi, 2019).

Isi dari petisi ini adalah desakan kepada pemerintah untuk segera memberikan payung hukum dan merekomendasikan status pusaka saujana (*cultural heritage*) kepada Gunung Bulu Bawakaraeng melalui lembaga pendidikan dan budaya (UNICEF) PBB. Petisi ini telah dibuat sejak tahun 2018, kemudian mulai dijalankan bersamaan dengan deklarasi pembentukan FISS pada 27 Mei 2018 di FEB Unhas. Petisi mulai digagas jauh-jauh hari sebelum pembentukan FISS, sehingga kehadiran petisi menjadi hal yang cukup penting untuk gerakan FISS. Hingga kini telah ditandatangani oleh 32.924 Partisipan termasuk didalamnya beberapa komunitas dan tokoh intelektual.

## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Identitas Informan**

- 1. Nevy James Tonggiroh**, merupakan tokoh yang berperan besar dalam gerakan ini. Menjadi pusat dalam pengetahuan terkait Gunung Bulu Bawakaraeng.
- 2. Dr. Andi Yaqub Pasinringi La Tinaga S.Sy, M.H.I** merupakan tokoh yang mempengaruhi paradigma gerakan. Paradigma kepecintaalaman atau *neo-paradigm* cukup dipengaruhi oleh pemikiran beliau. Mengambil fokus kepecintaalaman dalam skripsi, disertasi dan tesisnya.
- 3. Muhammad Natas Resky Subair S.E** merupakan tokoh penasehat dan pertimbangan gerakan Forum Intelektual Selatan Sulawesi. Kelahiran 31 Maret 1989, asal daerah Sengkang Kabupaten Wajo, Jenis Kelamin Laki-laki.
- 4. Andi Rewo Batari Wanti S.IP** merupakan Koordinator Eksekutif Forum Intelektual Selatan Sulawesi. Asal daerah Kabupaten Wajo, berusia 25 tahun.
- 5. Akbar Alamsyah** merupakan Wakil Koordinator 1 bidang Data Forum Intelektual Selatan Sulawesi. Laki-laki berusia 25 Tahun, asal daerah Kota Makassar.
- 6. Aslam Azis S.Ikom** merupakan Wakil Koordinator 2 bidang media Forum Intelektual Selatan Sulawesi. Laki-laki berusia 25 tahun, asal daerah Kota Makassar.



7. **Hasbi Assidiq**, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2015. Laki-laki berusia 22 tahun, asal daerah Kabupaten Bantaeng.
8. **Desriani S.P**, Sarjanawan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin angkatan 2014. Kini tengah mengenyam pendidikan di program pascasarjana Universitas Hasanuddin. Perempuan, berusia 26 Tahun asal daerah Kabupaten Sidrap.
9. **Zulfikar Farma S.E**, sarjanawan ekonomi Universitas Hasanuddin angkatan 2014. Laki-laki berusia 24 Tahun, asal daerah Kabupaten Bulukumba.

#### **B. Proses Gerakan Sosial Gunung Bulu Bawakaraeng *Heritage***

Membahas gerakan sosial tentu tak dapat dilepaskan dari tindakan bersama sekelompok manusia yang bermula akibat konflik, ini yang diistilahkan Singh (2010) dengan Aksi kelompok konfliktual. Aksi kolektif konfliktual merupakan usaha kolektif dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek, tujuan-tujuan jangka menengah dan nilai-nilai yang dianut bersama, bahkan meski berhadapan dengan penentangan dan konflik (Singh, 2010).

Gerakan sosial secara periodik terbagi dalam gerakan sosial lama dan gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru adalah representasi gerakan kemanusiaan dan kealaman, menentang segala bentuk eksploitasi dan ketertindasan baik untuk manusia maupun Alam. Gerakan ini diidentikkan dengan gerakan humanis, plural, rasionalitas dan reformis (Singh, 2010). Dalam gerakan sosial baru, dikenal dua konsep gerakan yaitu mobilisasi sumber daya dan teori identitas kolektif.

Gerakan sosial Gunung Bulu Bawakaraeng *heritage* dapat diasosiasikan dengan konsep identitas kolektif dalam gerakan sosial baru. Menurut Abercrombie, Hill, & Turner (2010), identitas adalah kesadaran akan diri, kedirian, tentang sosok yang seperti apa dirinya itu. Identitas selalu melibatkan persamaan dan perbedaan (Sukmana, 2013). Menurut konsep gerakan identitas kolektif, para partisipan menegaskan aksi-aksi mereka bukan dalam kerangka menjadi pengemban nilai-nilai proletariat semata, melainkan sebagai manusia secara keseluruhan. “Ada kesepakatan umum bahwa gerakan berorientasi identitas dan aksi kolektif (*collective action*) adalah ekspresi pencarian manusia terhadap identitas, otonomi dan pengakuan” (Rusmanto, 2013, hal. 73).

Analisis ini tentu tak dapat dilepaskan dari fokus perjuangan Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!* yang menekankan pada kesadaran diri sebagai manusia. Kesadaran identitas manusia kemudian akan menjawab persoalan kerusakan lingkungan, terutama interelasi antara Tuhan, Alam dan Manusia. Permasalahan yang terjadi dianggap merupakan kegagalan manusia memahami kodratnya sebagai makhluk ciptaan yang memiliki kesamaan status dengan gunung, sebagai sesama makhluk yang berinteraksi secara intersubjektif. Lebih lanjut dijelaskan,

Ketika kita mau berbicara tentang gunung, pastikan diri kita ini manusia dulu, karena kalau tidak pasti salah.

(Wawancara Nevy, 11 November 2019).

Namun sebelum itu, yang perlu dikoreksi adalah FISS dengan gerakan sosial Gunung Bulu Bawakaraeng *heritage* dianggap bukan gerakan dengan isu

lingkungan semata. Isu lingkungan dianggap sebagai gerakan yang cukup sempit dan terbatas. Meskipun tak dapat dielakkan kalau isu lingkungan juga termasuk isu yang FISS perjuangkan, tapi bukan sebagai orientasi utama dalam gerakan ini, melainkan isu identitas. Lebih lanjut dijelaskan,

Kalau mau masuk ke kor isu, bukan isu lingkungan tapi dia lebih jauh, isu identitas kebangsaan, itu yang di perjuangkan FISS. Jadi gerakannya yang dia perjuangkan identitas sosial. Lingkungan hanya bagian terkecil.

(Wawancara Yaqub, 13 Desember 2019).

Identitas kebangsaan sebagai identitas sosial dalam gerakan dijadikan sebagai dasar perjuangan. Identitas kebangsaan dan identitas manusia membentuk nilai-nilai dalam perilaku dan gagasan gerakan sosial ini. Dalam konsep identitas kolektif, “para aktor kolektif kontemporer menilai, penciptaan identitas melibatkan daya tanding soal seputar penafsiran kembali norma-norma, penciptaan makna-makna baru, dan sebuah tantangan untuk konstruksi sosial dari batas-batas antara aksi publik, privat dan domain politis” (Rusmanto, 2013, hal. 74) .

Kerusakan alam akibat cara pandang subjek-objek juga mewujud dalam mentalitas *frontier*. Chiras menjelaskan mentalitas merusak ini dengan tiga klasifikasi, yaitu melihat sumberdaya alam sebagai sumberdaya tak terbatas untuk digunakan manusia, melihat manusia terpisah dari alam dan bukan merupakan bagian dari alam, memandang alam sebagai sesuatu perlu ditundukkan dan dikuasai (Susilo, 2009). Ketiga mentalitas ini menjadi sebuah patologi dalam masyarakat.

Menjadikan manusia sebagai makhluk yang tidak bertanggungjawab dengan mengangkat kesan egoisme.

Terlebih lagi jikalau memasukkan aspek industrialisasi di dalamnya, maka niscaya akan muncul cara pandang yang melihat lingkungan dalam kacamata komoditas industri. Dalam kacamata industrialisasi, potensi alam adalah hal yang bernilai tukar apabila dijadikan komoditas ekonomi. Konsekuensi dari mode industrialisasi kapitalisme modern adalah tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi. Permintaan yang terus menerus dari pasar dan pola konsumsi yang massif menjadi konsekuensi dari degradasi lingkungan (Goldblatt, 2015).

Herbert Marcuse mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat produksi sebuah pabrik maka semakin bertambah beban kerusakan yang harus dipikul oleh alam semesta didalamnya hanya untuk memenuhi kebutuhan akumulasi modal para pemilik modal atau untuk memenuhi kepuasan konsumsi se-kelompok manusia yang begitu tinggi (Situmorang, 2013).

Parahnya lagi apabila sumberdaya alam dianggap sebagai hal yang tak pernah habis apabila dieksploitasi berlebih. Goldblatt (2015) melihat adanya kombinasi sistem ekonomi kapitalis dan persepsi kultural yang melihat dunia alam sebagai komoditi yang tak terbatas. Hasil dari cara pandang ini menjadi dasar dari eksploitasi berlebih untuk memenuhi kebutuhan permintaan yang terkonstruksi dengan gaya hidup masyarakat modern.

Perilaku konsumtif terhadap keindahan gunung juga terjewantahkan dalam bentuk cara pandang eksploitatif. Seperti segelintir orang yang memiliki kesadaran

palsu dalam melihat Gunung Bulu Bawakaraeng sebagai pemuas hasrat. Kesadaran palsu disini dapat dimaknai dengan adanya pemahaman bahwa Gunung Bulu Bawakaraeng harus dijaga, tetapi alasan untuk dijaganya karena keindahannya semata. Lebih lanjut dijelaskan,

Yang paling dangkal ini melihat masalah hanya dari *landscape* saja. Jadi sebaran sampah di area BWK itu mengganggu estetika. Itu kan persoalan yang ada dipermukaan.

(Wawancara Natas, 2 Desember 2019).

### **1. Permasalahan di Gunung Bulu Bawakaraeng**

Gunung Bulu Bawakaraeng merupakan salah satu tempat vital bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Area gunung ini merupakan sumber air bersih untuk beberapa kabupaten/kota yang dialirinya. Selain itu Gunung Bulu Bawakaraeng menjadi tempat hidup dari ratusan satwa dan vegetasi yang bergantung dari eksistensinya. Namun dalam melihat permasalahan yang dihadapi Gunung Bulu Bawakaraeng akibat dari pola pikir dan perilaku merusak manusia, tak bisa hanya sekedar dari fungsinya secara material saja.

Terdapat permasalahan non materiil dalam hal ini substansial yang sedang dihadapi Gunung Bulu Bawakaraeng. Hal ini tak lepas dari ketidakfahaman manusia melihat keistimewaan Gunung Bulu Bawakaraeng dalam sudut pandang kedudukan dan sejarah. Beberapa masalah yang kini sedang dihadapi Gunung Bulu Bawakaraeng adalah kekeliruan dan atau ketidaktahuan melihat aspek kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng, serta

sebagai tempat bersejarah dalam perkembangan masyarakat Gowa-Makassar dan daerah-daerah lain yang dipengaruhinya.

Ada tiga hasil identifikasi dan analisis yang dapat menjawab pertanyaan terkait pentingnya memperjuangkan Gunung Bulu Bawakaraeng. Persoalan ini terkait dengan substansi non materi seperti kedudukan dan sejarah. Selain itu, ada persoalan materiil lain, yaitu fungsi Gunung Bulu Bawakaraeng untuk kehidupan mahluk-mahluk lainnya.

#### **a. Tidak Memahami Kedudukan Gunung Sebagai Mahluk**

Istilah kedudukan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tingkatan, martabat dan status. Kedudukan dimaknai sebagai identitas yang melekat pada sesuatu yang dilihat dari hakikat penciptaannya. Manusia dan Gunung memiliki kedudukan yang sama, sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Lebih lanjut dijelaskan,

Tuhan menciptakan ciptaannya, semua ciptaannya disebut Mahluk. Mahluknya ada banyak, diantaranya manusia dan gunung. Hubungan antara manusia dan gunung ini harus dilihat sebagai hubungan inter-subjektif, bukan subjek-objek.

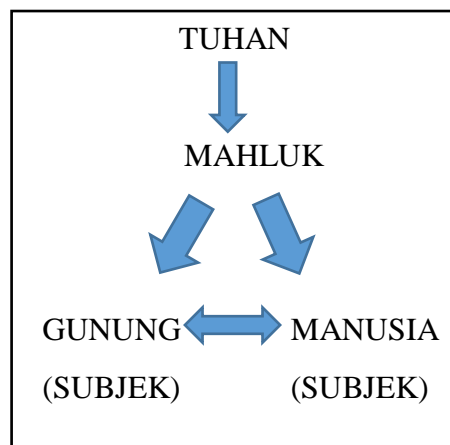
(Wawancara Nevy, 11 November 2019)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam gerakan Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!*, paradigma intersubjektif digunakan untuk melihat relasi ideal manusia dan alam. Paradigma ini memandang posisi gunung dan manusia di posisi yang sama, sebagai mahluk ciptaan. Ini juga membantah pandangan yang menganggap gunung itu sebagai benda

mati. Paradigma subjek-objek dianggap sebagai masalah cara berfikir yang melahirkan tindakan destruktif. Lebih jelas menurut Yaqub,

Dalam teks-teks suci jelas, jangan anggap itu gunung berdiam diri. Dalam Al-qur'an dijelaskan dia bergerak seperti awan. Gunung juga aktif, dengan caranya.

(Wawancara Yaqub, 13 Desember 2019)



Gambar 5.1 Konsep Relasi Manusia-Alam  
(Wawancara Nevy, 11 November 2019)

Untuk melihat gunung, diingatkan untuk senantiasa memahami kodrat manusia sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang seimbang dengan gunung, namun berbeda dalam maknanya. Pengkategorian aktif yang melekat pada manusia dianggap tidak bisa dijadikan standar untuk mengukur sesuatu yang lain diluar diri. Jadi untuk mengukur keaktifan gunung, hendaknya memahami kedudukannya, Lebih lanjut dijelaskan

Kita ambil yang paling sederhana. Manusia itu beribadah, dia (gunung) juga beribadah. Pertanyaannya sama kita dengan dia tidak? Makanya kata aktif yang melekat ke kita tidak boleh dilekatkan pada dia.

(Wawancara Yaqub, 13 Desember 2019)

Penegasan yang dijadikan sebagai dasar dari sudut pandang memahami manusia itu terlontar dari kelayakan kita sebagai manusia. Seorang manusia yang memiliki sifat manusia tidak akan merugikan sesuatu hal diluar dirinya. Manusia akan memahami segala kekurangannya dan menganggap segala sesuatu hal diluar dirinya sebagaimana dirinya. Yakni memiliki kesempatan untuk hidup dan tetap sebagaimana ketentuan awalnya.

Kedudukan menjadi poin dasar untuk menjawab pertanyaan terkait pentingnya melindungi Gunung Bulu Bawakaraeng. Pada dasarnya gunung merupakan makhluk yang diciptakan Tuhan di bumi. Namun ada hal yang berbeda dalam kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng dengan gunung-gunung lainnya di Sulawesi Selatan khususnya. Ada keterkaitan erat antara sejarah dan kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng. lebih lanjut dijelaskan Natas,

Tapi dari aspek sejarah, disini nanti yang membedakan yang kemudian kita bahasakan dengan kedudukan. Bicara kedudukan jelas berbeda antara Gunung Bulu Bawakaraeng dengan gunung yang lain, ini yang membuat kita tidak bisa meninggalkan persoalan ini begitu saja kemudian pindah ke persoalan gunung yang lain.

(Wawancara Natas, 2 Desember 2019)

Kerusakan kedudukan dianggap sebagai masalah utama yang terjadi di Gunung Bulu Bawakaraeng. Berbagai cara pandang dan perilaku yang merusak ketika memperlakukan Gunung Bulu Bawakaraeng merupakan kegagalan dalam memahami kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng, yaitu sebagai makhluk dan memiliki hakikat penciptaannya yang sesuai dengan fungsinya.



Kerusakan dalam bentuk perilaku manusia, sebagai contoh dapat dilihat ketika dilakukannya upacara 17 Agustus di puncak Gunung Bulu Bawakaraeng, seperti yang dijelaskan Nevy,

Kerusakan kedudukan itu ketika tidak sesuai kedudukannya. Tempat ini adalah tempat orang beribadah, tiba-tiba jadi tempat upacara 17-an, itu namanya kerusakan kedudukan. Tiba-tiba jadi lokasi wisata.

(Wawancara Nevy, 11 November 2019)

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Gunung Bulu Bawakaraeng memiliki keistimewaan tersendiri dalam hal kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng sebagai mahluk yang juga berkaitan erat dengan perilaku berkunjung ke gunung tersebut. Perilaku yang dinilai keliru seperti kunjungan yang massif dan sporadis pada saat hari kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 agustus setiap tahunnya yang mengakibatkan kerusakan secara inmateriil.

Kerusakan inmateriil seperti yang disebutkan diatas terjelaskan dalam kerusakan memahami kedudukan gunung Bulu Bawakaraeng sebagai tempat istimewa yang tidak selayaknya ditempati upacara 17 Agustus. Upacara 17 Agustus yang setiap tahunnya dilakukan dinilai melanggar kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng dan secara kritis dianggap hanya sebatas pemuas hasrat pengunjung semata. Hal ini ditegaskan Nevy,

Ini yang disebut banalitas, berlindung dibalik proklamasi 17 untuk melegalkan keinginannya kesitu. Kenapa dulu tidak pernah dilakukan, kenapa sekarang orang lakukan. Karena tidak faham ini. Ini kan terjadi karena media sosial semua. Secara ekosistem kan merusak juga. Secara geologi juga merusak. Tapi kalau dilakukan di tempat lain tidak berlaku, karena batumannya beda.

(Wawancara Nevy, 11 November 2019)

## **b. Tidak Memahami Sejarah Gunung Bawakaraeng**

Gunung sebagaimana lingkungan hidup manusia pada umumnya, telah menjadi monumen penting perkembangan kehidupan manusia. Dirinya telah menjadi saksi atas berbagai fenomena-fenomena sejarah yang mempengaruhi kehidupan kita hingga hari ini. Sejarah sangat bermakna bagi kehidupan umat manusia. Sebab dengan memahami sejarah, manusia dapat mengetahui dirinya sendiri. Karena segenap umat manusia telah dibentuk oleh lembaga-lembaga dan nilai yang diwarisi dari masa lampau (Perry, 2013). Berbagai peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi di masa dahulu dapat dijadikan referensi/rujukan kehidupan. Memahami sejarah membuat manusia memahami kodratnya sebagaimana kisah-kisah kehidupan terdahulu.

Aspek sejarah merupakan salah satu aspek yang sangat vital jika disangkut pautkan dengan Gunung Bulu Bawakaraeng. Sebagai salah satu gunung tertinggi di Sulawesi Selatan, Gunung Bulu Bawakaraeng dianggap memiliki nilai historis-cultural yang sangat besar. Hal ini yang kemudian menjadikan Gunung Bulu Bawakaraeng istimewa dan vital untuk dijaga kelestariannya.

Gunung Bulu Bawakaraeng dipercaya sebagai tempat bersejarah yang meletakkan peradaban di Sulawesi Selatan, khususnya Gowa-Makassar. Salah satu keterkaitan besar antara Gunung Bulu Bawakaraeng dengan kerajaan Gowa adalah tokoh Tumanurung. Ketokohan Tumanurung kerap kali hadir

dalam peristiwa-peristiwa sejarah kehidupan awal di Sulawesi Selatan, bahkan dianggap sebagai tokoh suci yang meletakkan dasar peradaban di tanah ini. Tokoh Tumanurung dipercaya merupakan seorang manusia perempuan yang membawa amanah kehidupan. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut,

Sejarah Gowa sekarang yang ditulis hanya bicara awal dari 4 raja, yang dia tulis Batara Guru, Batara Lattu, Datu' Marancai terus Karaeng Katangka. Dia Cuma tulis begini tapi dia tidak tau siapa ini dimana tempatnya. Baru kemudian dia masuk Kerajaan Gowa awal munculnya Tumanurung Karaeng Tu Bainea ri Gowa. Waktu datang posisinya Tumanurung, baru diangkat menjadi raja. Seorang raja, bukan sekedar raja perempuan, kata 'Tu' disini berarti itulah raja perempuan yang manusia.

(Wawancara Nevy, 11 November 2019)

Tokoh Tumanurung digambarkan sebagai manusia perempuan yang telah dicitrakan akan menjadi pemimpin di tanah Gowa. Kemunculannya dinantikan umat manusia di masa itu. Keterkaitan erat antara Gunung Bulu Bawakaraeng dengan Tumanurung adalah asal Tumanurung yang dipercaya memiliki kerajaan di sekitar gunung Bulu Bawakaraeng. Selain itu awal kemunculannya itu berada di Puncak Gunung Bulu Bawakaraeng. Lebih lanjut dijelaskan,

Setelah dipersiapkan Tumanurung itu turun menjadi raja, kemunculan pertama itu di puncak Bawakaraeng. Waktu dia muncul, Pacalayya liat terang benderang cahaya di puncak.

(Wawancara Nevy, 11 November 2019)

Keterkaitan Tumanurung dengan Gunung Bulu Bawakaraeng tak hanya dilihat dari teritorial semata. Sebagaimana diketahui bahwa kerajaan Gowa merupakan kerajaan Islam terbesar di Sulawesi Selatan. Melekatnya identitas

keislaman secara institusional kerajaan memperlihatkan relasi yang kuat antara Kerajaan Gowa dengan Islam. Bahkan identitas religiusitas Gunung Bulu Bawakaraeng terjelaskan dari penamaan Gunung Bulu Bawakaraeng. Lebih lanjut dijelaskan,

Bawakaraeng itu unik, karena dia itu simbol sejarah masuknya ajaran Islam di Sul-Sel. Nama Bawakaraeng diambil dari bahasa Arab, dari kata Al-karim yang menjadi Karaeng. Dia juga merupakan akar dari kemunculan kerajaan Islam seperti Kerajaan Gowa, Kerajaan Bone dan lain-lain. Ini nanti yang menjelaskan kenapa ada ritual diatas gunung yang berdatangan dari berbagai suku karena sejarah itu.

(Wawancara Nevy, 11 November 2019)

Aktivitas keagamaan atau lazim disebut ritual yang hingga kini masih berlangsung di Puncak Gunung Bulu Bawakaraeng adalah Shalat Idul Adha. Aktivitas ini dianggap berkaitan erat dengan relasi Islam di Gunung Bulu Bawakaraeng. Di setiap hari raya Idul Adha, banyak masyarakat yang mengunjungi Gunung Bulu Bawakaraeng untuk menjalankan ritual sholat. Aktivitas ini tentu memiliki pijakan nilai tersendiri, sebab dianggap hanya satu-satunya gunung di dunia yang ditempati sholat setiap sekali dalam setahun. Meskipun dinilai terdapat kejanggalan dalam pemberitaan-pemberitaan di media-media mainstream, sehingga menimbulkan stigma negatif kepada gunung ini. Hal ini juga dijelaskan Nevy,

Satu-satunya gunung yang paling sering kena fitnah setiap tahunnya adalah Bawakaraeng. Fitnahnya adalah tempat naik haji, tempat musrik, tempat yang angker dan banyak setannya. Fitnah ini terjadi setiap tahun yang diangkat oleh media.

(Wawancara Nevy, 11 November 2019)

Salah satu kerusakan inmateriil adalah stigma negatif masyarakat terhadap Gunung Bulu Bawakaraeng yang dianggap sebagai tempat musyrik, akibat pemberitaan Haji Bawakaraeng yang keliru. Persepsi Haji Bawakaraeng juga tidak dibenarkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar gunung ini. Cikal bakal stigma negatif ini berawal dari kejadian yang terjadi di tahun 1987 silam. Pada saat itu, terjadi musibah di hari Raya Idul Adha, menewaskan belasan orang karena kunjungan di saat cuaca buruk (Alam, 2019). Akibatnya muncul stigma negatif yang menganggap terjadi kemusyrikan di Gunung Bulu Bawakaraeng.

### **c. Kerusakan Fungsi Gunung Bulu Bawakaraeng**

Berbicara tentang fungsi, dapat pula diartikan sebagai manfaat. Segala sesuatu hal yang tercipta pasti memiliki sebab. Sebab ini yang diartikan sebagai kegunaan sesuatu untuk kelangsungan hidup manusia dan mahluk lainnya. Bukan hanya untuk manusia semata tapi juga menjelaskan keberadaan dan hakikat penciptaan sesuatu tersebut. Memanfaatkan sesuatu hal sesuai dengan kegunaan dan kebutuhan manusia. Meskipun tak jarang kata memanfaatkan disalah artikan menjadi eksploitasi. Dalam paradigma intersubjektif (kepecintaalaman) yang digunakan, manfaat sesuatu diartikan sebagai memberi atau mengembalikan kepada tujuan penciptaan mahluk itu. Lebih lanjut dijelaskan

Kajian subjek-objek menggunakan kata manfaat berarti mengambil. Kalau intersubjektif menggunakan kata manfaat berarti memberi. Mengantar sesuatu kepada tujuan penciptaannya.

(Wawancara Yaqub, 13 Desember 2019)

Eksistensi Gunung Bulu Bawakaraeng tak bisa dipisahkan dengan kehidupan makhluk lain yang saling terhubung satu sama lainnya. Keadaan gunung tentu memiliki manfaat terhadap kehidupan makhluk yang bergantung padanya untuk hidup, termasuk manusia. Sederhananya, mengambil manfaat dari Gunung Bulu Bawakaraeng untuk digunakan sesuai kebutuhan manusia. Dalam memanfaatkan gunung sebagai sumber kehidupan, manusia diberi akhlak untuk berperilaku dan berinteraksi dengan makhluk lainnya.

Ketergantungan manusia kepada gunung juga terlihat jikalau melihat gunung dalam beberapa bagian, seperti gunung sebagai menara air, gunung untuk ketersediaan pangan, gunung sebagai tempat hidup manusia dan makhluk lainnya. Makhluk hidup yang lain juga bergantung pada keadaan gunung, seperti vegetasi tumbuhan dan kehidupan spesies hewan lainnya. Keresahan akan degradasi alam dijelaskan oleh Rewo, menurutnya,

Saya yang paling mendasar itu di kepalaku, *kodong* banyaknya rusak ini apa-*apayya*. Padahal *bate na* ini yang ada dalam dirinya ini yang tumbuh betul-betul dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia, untuk berkebun, bertani, banyak yang ambil. Apa sih yang kita banggakan sebagai manusia? Kalau mau diliat kronologi penciptaan saja, duluan bumi kan diciptakan. Bahkan tanah itu kakak *ta ji*, itu lebih tua dari kita.

(Wawancara Rewo, 1 Desember 2019)

Gunung Bulu Bawakaraeng merupakan menara air bagi masyarakat yang menggunakannya. Sebagai menara air, Gunung Bulu Bawakaraeng menjadi sumber air bersih bagi kehidupan masyarakat di beberapa daerah, termasuk Kota Makassar dan sekitarnya, sebagaimana dijelaskan Nevy,

Setiap hari masyarakat kota menggunakan air PDAM yang bersumber dari Gunung Bawakaraeng, sekarang bagaimana bentuk terimakasihnya?

(Wawancara Nevy, 11 November 2019)

## **2. Dukungan dan Hambatan dalam Gerakan Sosial**

Perkembangan gerakan sosial juga dipengaruhi oleh faktor eksternal diluar kelompok penggerak. Hal ini turut memberikan warna tersendiri dalam dinamika gerakan sosial. Terdapat dukungan dan hambatan yang terjadi selama perkembangan gerakan sosial ini.

### **a. Dukungan Terhadap Gerakan**

Keberhasilan gerakan sosial dalam beberapa kasus tak hanya terjadi dari perjuangan di dalam kelompok penggerak semata. Terdapat bantuan *support* yang diberikan oleh pihak lain, baik individu maupun kelompok kepada persoalan yang sedang diperjuangkannya. Hal ini tentu tak lepas dari pewacanaan dan pendekatan komunikasi yang dilakukan. Terlebih jika dibenturkan dengan perkembangan media informasi yang memudahkan komunikasi.

Dalam kasus gerakan Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!*, potensi jejaring terlihat dalam aktivitas-aktivitas gerakan dan petisi yang hingga kini masih menuai dukungan publik. FISS sebagai sentrum gerakan Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!* berupaya untuk menghilangkan kesan eksklusifisme isu ini yang hanya terbatas di kalangan pecinta alam semata. Terdapat upaya untuk mengkampanyekannya ke publik melalui komunikasi dan petisi. Lebih lanjut dijelaskan,

Dengan teman-teman kampus, bangun komunikasi personal saja. Selain itu rancangan-rancangannya kayak kita juga mau ikut berjejaring dengan wadah gerakan lain.

(Wawancara Rewo, 1 Desember 2019)

Sebagai sebuah gerakan digital, dukungan publik tak harus berarti terlibat aktif secara langsung dengan mengambil peran dalam organisasi FISS. Sebagaimana aktivitas-aktivitas gerakan yang berlangsung pada organisasi yang sangat struktural, keterlibatan individu dalam bentuk dukungan harus melibatkan diri sebagai aktor organisasi atau paling tidak memiliki ikatan di dalam organisasi ini. Berbeda dengan pola gerakan yang digunakan oleh FISS sebagai kelompok yang memanfaatkan potensi jejaring dan komunikasi.

Setiap partisipan petisi yang merupakan masyarakat sipil diluar FISS, tanpa harus terikat oleh struktural organisasi boleh terlibat dalam gerakan petisi daring ini, tanpa harus menjadi anggota terlebih dahulu. Sebagaimana dijelaskan Aslam,

Sekedar mendukung ini gerakan bukan bilang dia gabung secara kelembagaan di FISS. Karena kita *nda* punya juga konstitusi, di awal kita *nda* rumuskan konstitusi, AD ART atau piagam segala macam. Cuman kita fokusnya ke penyusunan substansi petisinya untuk disebarluaskan.

(Wawancara Aslam, 4 Desember 2019)

Selain keterlibatan langsung, gerakan Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!* juga diperkuat oleh tergabungnya 32.924 penandatanganan petisi daring di situs *change.org*. Jumlah penandatanganan cukup menandakan bagaimana perkembangan dan dukungan dari publik kepada gerakan ini. Selain petisi daring, ada juga petisi fisik yang dibuat bersamaan dengan deklarasi. Petisi



fisik ini ditandatangani secara organisasional yang menandakan dukungan terhadap diberikannya status hukum kepada Gunung Bulu Bawakaraeng.

#### **b. Hambatan terhadap Gerakan**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ada keterkaitan yang erat antara cara pandang melihat gunung yang berdampak pada perilaku berkunjung ke gunung tersebut. Dampak dari cara pandang subjek-objek adalah pola pikir materialis melihat gunung, disini letak sisi hewani manusia (Muthahhari, 2002). Pola pikir materialis dianggap sebagai sebuah perubahan yang berkemunduran, sebagaimana dikatakan Nevy James, “Masalah utama adalah perubahan pola pikir dari spiritual ke material,” ujarnya.

Kendala lainnya dari segi regulasi adalah belum adanya perlindungan hukum kepada gunung. Hingga hari ini di Indonesia, gunung masih belum dianggap sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Akibatnya terjadi pengrusakan gunung di berbagai daerah. Dengan tidak adanya perlindungan hukum, kelestarian gunung semakin terancam. Mulai dari perilaku pengunjung yang merusak, perusahaan tambang yang tak bertanggung jawab hingga gaya hidup yang konsumtif. Sebagaimana dijelaskan Hasbi,

Kita memang perlu upaya agar lingkungan ini diberi status hukum supaya kedudukan fungsi dari lingkungan ini dapat berjalan sehingga tidak berdampak pada kerusakan lingkungan yang terus terjadi. Karena nantinya masyarakat yang akan menjadi pengampu karena mereka hanya memberi isyarat manusia lah yang akan membahasakannya.

(Wawancara Hasbi, 23 Desember 2019)

Pemerintah dianggap kurang memberikan perhatian pada permasalahan ini. Jika dilihat secara legal-formal, padahal pemerintah memiliki wewenang yang lebih terhadap permasalahan yang terjadi. Intisari yang dapat dipetik adalah kehadiran pemerintah cukup dibutuhkan untuk membenahi permasalahan ini. Namun, sejauh ini dianggap belum ada keseriusan yang dilakukan aparat pemerintahan. Ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan, terkait relasi kuasa yang ada. Lebih lanjut dijelaskan,

Kalau memang pemerintah serius memperhatikan gunung itu, dia akan mengambil status hukum paling atas. Jangankan itu, status taman nasional saja mereka tidak mau.

(Wawancara Nevy, 11 November 2019)

Untuk mewujudkan capaian gerakan yaitu status hukum, perlu adanya pembicaraan kedua belah pihak terkait perencanaan yang akan dilakukannya kedepannya. Upaya untuk berkomunikasi dengan pihak pemerintah sejauh ini telah dilakukan. Beberapa kegiatan telah dibuat untuk melakukan pewacanaan ke pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Lebih lanjut dijelaskan,

Kemarin itu kegiatan di Gowa Tahun lalu, waktu masih mulus-mulus toh. kita itu di FISS hampir *mi* berakhir gerakannya karena pembicaraannya ini harus di dorong dari Pemda ke Pemprov, Pemprov ke Kementerian, kementerian ke PBB begitu alurnya. Ini kayak kita *maumi* pindahkan beban ke Pemda. Ini kan secara eksekusi *nda* ada *anunya* FISS karena *na* kasih Pemda, pengawasan tetap jalan. Cuman selesai itu ternyata *nda* progresif ini pemda, ujung-ujungnya kayak bohong *ji* saja karena *nda* adami.

(Wawancara Akbar, 1 Desember 2019)

Ketidakjelasan yang diberikan pihak pemerintah kemudian nampaknya menimbulkan keraguan untuk menggunakan jalur litigasi atau legal-formal.

Sebagaimana dijelaskan diatas, untuk menuju status hukum *heritage* terdapat beberapa alur yang harus dilalui, mulai dari Pemda, Pemprov, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian UNESCO. Disini perhatian pemerintah sangat dibutuhkan. Salah satu dampak lainnya yang bisa ditimbulkan apabila proses komunikasi tak berjalan efektif adalah adanya kecurigaan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang akan berujung kepada perlawanan atau resistensi. Dari gerakan sosial ini, lawan politik yang dianggap sebagai penghambat untuk mencapai tujuan gerakan adalah segenap pihak yang melakukan tindakan pengrusakan terhadap gunung. Sebagaimana dijelaskan Akbar,

Semua yang bertentangan dengan kenapa Gunung Bulu Bawakaraeng ini penting. Orang yang mengadakan ritual pun, kalau dia musyrik dia juga akan menjadi lawan. Pemerintah kan mentok-mentoknya itu penguasaan lahan. Ini kan juga pengetahuan ta dibangun berbasis sains, secara sains ketika gundul akan banjir, longsor. Kemudian ketika tempat itu dijadikan tempat berperilaku menyimpang secara historis adat salah. Yang naik gunung juga begitu, pokoknya semua yang bertentangan dengan itu, semua menjadi lawan bukan hanya negara. Lawan perlu *ji* didekati untuk disadarkan.

(Wawancara Akbar, 1 Desember 2019)

Salah satu hal yang hendak dicapai dalam gerakan Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage*! adalah bentuk penyadaran kepada setiap manusia untuk bagaimana bersikap terhadap alam. Gerakan penyadaran ini dapat dilihat dari beberapa aktivitas yang dibuat FISS, seperti seminar, diskusi, selebaran hingga poster-poster kampanye. Petisi pun juga bisa dikatakan sebagai salah satu metode gerakan yang digunakan untuk mensosialisasikan nilai ini.

### 3. Tujuan (*Goals*)

Setiap gerakan sosial memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam gerakannya. Hal ini tentu tak lepas dari upaya penyelesaian masalah yang diberikan. Upaya penyelesaian masalah dilakukan dengan memberikan tawaran alternatif untuk perubahan. Dalam gerakan sosial ini sebagaimana terjelaskan di petisi daring, tujuan yang ingin dicapai adalah pemberian status hukum kepada gunung. Status gunung yang menjadi target gerakan adalah status *cultural landscape heritage*.

Tujuan *cultural landscape heritage* Gunung Bulu Bawakaraeng berangkat dari analisis masalah yang terjadi di gunung akibat tidak adanya payung hukum. *Cultural landscape heritage* atau pusaka saujana merupakan status perlindungan yang diberikan oleh UNESCO kepada peninggalan yang memiliki relasi alam dan budaya. Dalam Piagam pelestarian pusaka Indonesia (2003), pusaka saujana diartikan gabungan pusaka alam dan pusaka budaya dalam kesatuan ruang dan waktu.

Pusaka saujana (*cultural Heritage*) adalah seluruh unsur-unsur budaya, baik benda maupun tak benda yang memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut : (1) Berumur minimal 50 tahun; (2) Sarat dengan nilai-nilai religius,estetik,historis,seni dan sains; (3) Mewakili style,gaya hidup,waktu (kronos) atau daerah (topos) atau mindset (logos) tertentu; (4) ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang UU.No.3/1990 tentang Benda Cagar Budaya (Runa, Warnata, & Mahaputra, 2011).

Salah satu capaian besar dari *cultural landscape heritage* adalah pengakuan dan perhatian dunia internasional kepada Gunung Bulu Bawakaraeng. Alasan ditargetkannya Pusaka Saujana adalah dianggap satu-satunya aturan hukum yang mengaitkan antara lingkungan dan budaya. Lebih lanjut dijelaskan,

Contoh tidak ada satupun perlindungan hukum di negara Indonesia yang bisa memang mencakup konteks lingkungan dan *culture*. Taman nasional itu bicara flora-fauna *ji. nda* ada memang status hukum yang pas buat Bawakaraeng di Indonesia sehingga yang dilirik itu.

(Wawancara Akbar, 1 Desember 2019)

Ada beberapa pertimbangan lain untuk menjadikan Gunung Bulu Bawakaraeng sebagai pusaka saujana. Gunung Bulu Bawakaraeng memiliki keterikatan sejarah yang kuat dengan kerajaan-kerajaan di sekitar datarannya, termasuk Gowa. Selain itu, gunung ini dipercaya sebagai tempat penyebaran Islam. Salah satu keterkaitan erat antara itu adalah tradisi ritual sholat Idul Adha yang masih berlangsung hingga kini. Lebih lanjut dijelaskan,

Kalau UNESCO sederhana definisinya, jika ada satu aktifitas *culture* di satu tempat *landscape*, maka tempat itu harus dilindungi. Ada satu ritual rutin dan ritual di Bawakaraeng itu rutin. Sholat Idul Adha pertahun itu menurut UNESCO dia *culture*, yang seperti itu harus dilindungi.

(Wawancara Nevy, 11 November 2019)

Ada hal lain yang juga dinilai menjadi pertimbangan untuk mendorong *cultural landscape heritage* diterapkan selain aturan pemerintah. Yaitu adanya bentuk kecurigaan dan ketidakpercayaan kepada aparatus pemerintah selaku pengemban amanah. Sikap ini berangkat dari analisis melihat kerusakan yang

terjadi di beberapa taman nasional. Pemerintah dinilai tidak memberikan perhatian serius kepada persoalan ini. Lebih lanjut dijelaskan,

Itu kenapa *heritage* dipake karena mosi tidak percaya kepada semua status hukum negara. Banyak taman nasional rusak *ji* juga jadi ada kesan *inimi* level gunung tertinggi, ini jadi kepentingan dunia. Ketika dia di *heritage*, dia diakui menjadi penting untuk dunia bukan *mi* lagi penting untuk Indonesia.

(Wawancara Akbar, 1 Desember 2019)

Pusaka Saujana, ketika diterapkan dianggap dapat membatasi jumlah kunjungan ke Gunung Bulu Bawakaraeng. Sebagaimana dijelaskan bahwa salah satu faktor kerusakan Gunung Bulu Bawakaraeng adalah jumlah kunjungan yang massif dan sporadis. Untuk mengatur itu, maka kunjungan akan dibatasi hanya untuk beberapa tujuan tertentu, seperti pendidikan dan riset.

### **C. Proses Pemanfaatan Petisi *change.org* Gunung Bulu Bawakaraeng Harus**

#### **Segera di *Heritage*!**

Sebagai sebuah ruang publik digital, petisi *change.org* menjadi sebuah media untuk menyampaikan gagasan dan keberpihakan para aktivis sosial. Pengguna petisi, tanpa harus mendatangi tempat tertentu secara fisik dan menyatakan konsistensi terhadap sebuah masalah, bisa terlibat secara langsung dalam gerakan sosial tersebut. Setiap individu-individu tak harus membentuk kelompok sosial untuk melakukan gerakan, meskipun tetap dibutuhkan sesuai kebutuhan gerakan tersebut.

Dalam sebuah gerakan sosial, kehadiran petisi menjadi hal yang cukup dipertimbangkan untuk digunakan sebagai salah satu varian metode gerakan. Rasa-

rasanya gerakan tanpa petisi kurang afdal. Petisi menjadi kekuatan utama untuk menunjukkan dukungan publik terhadap masalah yang diperjuangkan. Apalagi di tengah kemajuan media teknologi informasi, akan sangat membantu koneksi jejaring gerakan. Kehadiran *change.org* menjadi penghubung virtual antara masyarakat dengan pemerintah dalam hal penyampaian aspirasi.

Gerakan petisi daring juga dapat disebut gerakan *connective action* atau gerakan sosial dalam konektivitas digital. Gerakan *connective action* merupakan sisi lain dari gerakan *collective action*, di mana setiap individu bisa melakukan partisipasi politik terhadap sebuah masalah dalam media digital (Nastiti, t.thn.). Keterlibatan individu bisa bersifat bebas, artinya setiap individu tak harus melakukan gerakan sosial secara terus-menerus. Jejaring merupakan salah satu kunci dalam gerakan ini, termasuk setiap upaya untuk menyebarkan masalah.

Gerakan *connective action* merupakan sebuah bentuk aktivisme digital yang dapat dilakukan dalam beberapa metode, termasuk petisi daring. Petisi daring menjadi media yang cukup digemari para warganet karena mudah diakses dan dapat memberikan bentuk keterlibatannya secara langsung. Petisi menjadi bentuk protes sosial individu yang mewakili dirinya dalam bentuk *user*. Lebih lanjut dijelaskan,

Kan awalnya sebelum ada petisi online ini kita kenal istilah referendum, referendum itu penentuan pendapat cuman istilahnya memang lebih luas dan isu-isu tertentu *ji* juga. Tapi kan referendum ini butuh biaya besar untuk menentukan bahwa setiap orang misalnya sepakat dengan hal ini atau tidak. Nah ini petisi memudahkan.

(Wawancara Hasbi, 23 Desember 2019)

Kemudahan petisi merupakan salah satu poin yang menjadi alasan pengguna petisi menggunakan petisi *change.org*. Pengguna petisi merupakan aktor yang memiliki alasan dan motif tertentu dalam melakukan sebuah tindakan sosial. Sebagai pembuat petisi, FISS tentu memiliki dinamika dalam memanfaatkan petisi, mulai dari proses pembuatan petisi, penulisan narasi, penyebaran petisi hingga sejauh mana perkembangan petisi tersebut.

### **1. Kegunaan Petisi Daring**

Petisi menjadi salah satu metode gerakan yang digunakan oleh Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS) untuk melakukan aktivitas pengadvokasian. FISS telah mengeluarkan dua buah petisi yang memiliki substansi yang sama namun dalam media yang berbeda. Petisi yang dibuat secara cetak dan petisi daring di situs *change.org*. Namun berbeda dengan gerakan sosial pada umumnya yang menggunakan petisi setelah membentuk kelompok gerakan, FISS malah sebaliknya. Petisi yang dibuat FISS mulai berjalan bersamaan dengan deklarasi pembentukan organisasi ini.

Kehadiran Petisi dianggap sebagai sesuatu hal yang penting dalam gerakan ini. Oleh karena itu, jauh sebelum FISS terbentuk, petisi yang dibuat secara cetak maupun daring telah disusun dan mulai berjalan setelah deklarasi dibacakan, lebih lanjut dijelaskan,

Jadi memang ide petisi ini lebih duluan hadir daripada FISS. Seingatanku nah. Jadi bukan karena ayo bikin FISS baru kita bikin petisi, *nda*. Nah kita bikin petisi susun nah kita butuh wadah untuk



ini. Jadi memang orientasinya ini kita ke wacana baru bikin wadahnya.

(Wawancara Aslam, 4 Desember 2019)

Penggunaan petisi dalam gerakan ini tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terlebih lagi sebelum pembentukan FISS, gerakan Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!* sudah berkembang dan telah menjadi wacana tersendiri, terutama dikalangan komunitas pecinta alam. Kehadiran FISS sebagai media pewacanaan untuk seluruh kalangan masyarakat luas ini dinilai membutuhkan metode-metode gerak. Metode petisi sejauh ini digunakan untuk beberapa hal, diantaranya:

**a. Sebagai Bentuk Kampanye**

Aktifitas kampanye menjadi aktifitas yang penting dalam gerakan sosial Gunung Bulu Bawakaraeng *heritage* ini. Hal ini tentu tak lepas dari upaya untuk menghilangkan kesan terbatasnya isu yang dianggap terlalu dekat ke kalangan kelompok pecinta alam semata. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kehadiran FISS merupakan salah satu upaya untuk mempublikkan permasalahan ini. Permasalahan utama yang terjadi adalah pola fikir yang melahirkan perilaku merusak cukup dominan, sehingga dibutuhkan penyadaran kepada masyarakat umum.

Selain itu, masalah yang terjadi di Gunung Bulu Bawakaraeng dianggap bukan masalah sepele. Gunung Bulu Bawakaraeng dianggap sebagai sesuatu hal yang sangat istimewa, dilihat dari aspek sejarah dan kedudukannya. Isu Gunung Bulu Bawakaraeng dilihat sebagai isu yang memiliki skala yang besar,

oleh karena itu perlu dukungan yang tak terbatas oleh jarak dan tempat. Hal ini dijelaskan oleh Rewo, menurutnya

Kita mau orang-orang tau bahkan di luar Sulawesi bahwa ini ada masalah di Gunung Bawakaraeng.

(Wawancara Rewo, 1 Desember 2019)

Kampanye merupakan bentuk dari sosialisasi masalah kepada khalayak yang menjadi sasaran dalam gerakan ini. Sosialisasi masalah dianggap dapat merubah cara pandang dan perilaku dominan yang sedang jadi masalah lain. Latar belakang masalah menjadi media informasi kepada khalayak publik terkait masalah ini. Sebagai sebuah ruang publik virtual, penulisan narasi dalam latar belakang dapat dilihat sebagai sebuah proses komunikasi yang melahirkan wacana untuk melakukan perubahan sosial. Lebih lanjut dijelaskan,

Dia dijadikan juga sebagai model lain untuk mensosialisasikan permasalahan, karena kan ada latarbelakang masalah di petisi. Cuma *nda* pernah diukur sejauh mana keberhasilannya kemudian setelah orang baca.

(Wawancara Akbar, 1 Desember 2019)

Untuk menjadikan petisi sebagai alat kampanye, selain jumlah penandatanganan juga dipengaruhi oleh narasi yang dituliskan pada latar belakang masalah. Narasi yang dituliskan sebagai informasi masalah pada latar belakang akan mempengaruhi partisipasi warganet untuk mengisi petisi. Narasi yang bernada edukatif dan objektif akan mempengaruhi psikologi pembaca untuk mengisi petisi yang dibuat. Selain itu narasi juga menjadi pertimbangan ketika partisipan hendak mengisi petisi.

Pertimbangan narasi di latarbelakang masalah menjadi pertimbangan lain sebelum partisipan menandatangani. Ini akan sangat bergantung dari gaya penulisan latar belakang tersebut. Salah satu partisipan petisi Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!*, Hasbi menjelaskan pengaruh narasi terhadap tandatangan petisi, menurutnya

Saya melihat ke isu dulu. Setelah melihat ke isunya kemudian melihat bagaimana pembuat petisi itu menarasikan. Sehingga kita faham apa alasannya membuat petisinya. Tergantung dari pembuat petisi, bagaimana bisa dia buat informasi yang lebih jelas dan mudah difahami.

(Wawancara Hasbi, 23 Desember 2019)

Pentingnya penggunaan latar belakang masalah sebagai bentuk penginformasian masalah sepertinya telah menjadi perhatian pihak *change.org* dalam mengelola platform ini. Salah satu keunggulan lain dari fitur *change.org* adalah tidak membatasi karakter kata dalam latar belakang masalah, sehingga pihak pembuat dapat membuat narasi sesuai dengan kebutuhan informasinya. Ini yang menjadi pembeda antara petisi change dengan media-media sosial yang lain. Lebih lanjut dijelaskan,

Terbatasnya karena kalau kayak twiter atau instagram, jumlah karakter sekian dibatasi. Sementara kita perlu penjelasan panjang soal apa duduk masalahnya. Di change bebas, jadi kita lebih bisa menjelaskan lebih komprehensif tentang persoalan.

(Wawancara Aslam, 4 Desember 2019)

## **b. Sebagai Daya Tekan Politik**

Petisi daring merupakan salah satu metode gerakan sosial dalam ruang *cyber*. Sebagai sebuah gerakan sosial, petisi menghendaki adanya pola

perlawanan, terutama kepada pihak yang memiliki kekuasaan dominan. Pola resistensi ini terbangun dalam kerangka skeptisisme kepada pihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Terlebih lagi, gerakan ini memperjuangkan pengakuan legal-formal kepada kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng yang memiliki makna sejarah, kedudukan dan fungsi yang besar bagi kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada poin hambatan, Pemerintah hingga kini dianggap belum memberikan perhatian lebih kepada kedudukan Gunung Bulu Bawakaraeng. Padahal upaya memperjuangkan Gunung Bulu Bawakaraeng telah berlangsung bertahun-tahun yang lalu. Berangkat dari permasalahan ini, muncullah analisis untuk menggalang kekuatan supaya memiliki daya tekan lebih melalui keterlibatan langsung publik.

Keterlibatan publik mewujud dalam tandatangan petisi yang dapat dilakukan siapapun yang memiliki keresahan bersama. Setiap tandatangan pengguna kemudian dikonversi menjadi angka-angka yang digunakan sebagai daya tekan politik. Harapannya, semakin banyak penandatangan petisi maka semakin besar peluang petisi ini bakal dilirik pemerintah, sebagaimana dijelaskan Rewo,

Terus sebenarnya ekspektasinya kemarin angka-angka yang ada di petisi itu bisa digunakan, kayak arsip untuk menghitung jumlah orang yang terlibat di gerakan yang bisa digunakan untuk menekan pemerintah kalau banyak *mi* yang *cares* sama ini.

(Wawancara Rewo, 1 Desember 2019)

Daya tekan politik secara sederhana dapat dilihat sebagai sebuah tekanan kepada pihak pemerintah melalui upaya menarik simpati masyarakat untuk mendukung gerakan sosial. Petisi daring merupakan salah satu metode untuk menguatkan peran masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah. Ada kekosongan gagasan dan ide masyarakat yang belum diisi oleh pihak pemerintah, sehingga masyarakat menggunakan petisi untuk mendesak untuk adanya perubahan dalam bentuk regulasi, seperti yang FISS perjuangkan.

Petisi daring merupakan media sosial di ruang publik digital yang digunakan untuk merespon permasalahan. Oleh karena itu, terdapat kemiripan antara media sosial pada umumnya dengan situs *change.org* sebagai penyedia jasa layanan petisi. Namun yang membedakan adalah di situs *change.org*, pembuat dan partisipan petisi dapat dengan langsung mengikuti perkembangan jumlah penandatanganan petisi, yang digunakan untuk menekan pihak pengambil kebijakan. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut,

Mirip-mirip *ji* fungsinya kayak *website* atau blog-blog begitu, media sosial lain. Bedanya cuman kita bisa tau secara politis ada berapa banyak orang yang dukung kita.

(Wawancara Rewo, 1 Desember 2019)

Hingga hari ini, petisi masih digunakan dalam kurun waktu hampir mendekati dua tahun. Berbagai upaya dialog dan pertemuan telah dilakukan dengan pihak pemerintah daerah, namun tak kunjung mendapatkan respon, terutama dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dianggap tak memberikan reaksi kepada kelompok dan petisi FISS. Oleh karena itu, alur

gerakan yang FISS jalankan kini melalui pergerakan rakyat, melalui pembasisan, sebagaimana dijelaskan Koordinator FISS,

Petisi tetap ji terus di *foll up*, yang mau diperbaharui itu metode kegiatan. Untuk bisa membasis lebih kuat lagi toh. Karena *people power* ji bisa diharapkan. Karena kalau mau mengharapakan mereka (pemerintah) susah juga. Andaikan ada pemerintah yang progresif, memihak pada ini perjuangan mungkin agak lebih mudah. Karena harapanku kenapa Pemprov, karena dia bisa *foll up* ke kementerian.

(Wawancara Rewo, 1 Desember 2019)

## **2. Proses Penginformasian Petisi**

Setelah mempertimbangkan penggunaan petisi sebagai salah satu metode gerak, FISS kemudian melakukan proses penginformasian petisi kepada khalayak publik. Tujuan dari penginformasian petisi adalah sebagai bentuk pengkampanyean dan menggalang solidaritas masyarakat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, *change.org* memberikan fitur sebar kepada setiap petisi melalui media-media sosial. Selain itu, petisi juga dapat dikirim kepada email setiap pengguna lainnya, namun fitur ini dikenai biaya.

Proses penginformasian petisi melalui media sosial cukup mudah, untuk menjangkau warganet maupun komunitas-komunitas dalam grup-grup media sosial tersebut. Setiap pengguna setelah menandatangani petisi kemudian menyebarkan petisi ini sebagai bentuk keterlibatan dalam gerakan sosial ini. Pola ini kemudian akan terus berlangsung hingga mencapai angka tertentu.

Demikian halnya dengan petisi yang digawangi oleh FISS. Pola *share* dijadikan metode teknis untuk menyebarkan petisi kepada khalayak umum.

Pola *share* yang dilakukan pasca menandatangani petisi bisa dikatakan menjadi faktor kunci dari terlibatnya 32.924 pengguna. Pengguna tidak harus menjadi anggota FISS untuk menyebarkan petisi ini, keterlibatan individu menjadi cukup bebas dalam pengawalan masalah ini. Penggunaan media sosial yang cukup massif seolah memberi sinergitas terhadap upaya menggalang dukungan petisi. Seperti Desri, salah seorang informan yang mendapatkan informasi petisi ini dari media sosialnya, “dari sosial media sama dari teman-teman,” ujarnya.

Pola penginformasian dalam media sosial *cyberspace* adalah pola jejaring. Kehadiran petisi daring menjadi salah satu bentuk dari gerakan *connective action*, dimana tindakan dilakukan secara kolektif melalui jaringan-jaringan maya melalui media sosial internet. Jaringan maya ini menghubungkan individu maupun komunitas hanya dengan menyebarkan petisi tersebut. Pengguna *change.org* diberikan kemudahan dalam menyebarkan petisi tergantung pada kontribusi yang diberikan dan di media sosial apa dia mau menyebarkan petisi ini.

Setelah petisi dimasukkan ke dalam situs *change.org*, maka dilanjutkan dengan menyebarkan petisi tersebut. Mula-mula petisi disebarkan melalui akun resmi Bawakaraeng *Heritage* di media sosial Instagram, kemudian melalui akun-akun pribadi anggotanya. Lebih lanjut dijelaskan,

Pertama dari akun *officialnya* FISS, Bawakaraeng *Heritage*. Terus, ke akun *officialnya* Kriyaw juga. Selebihnya ke akun-akun pribadi di lingkaran *ta'*, di jaringan *ta'* kayak gitu. Barukan abangkan luas jaringannya, jadi menyebar sampai orang-orang yang kita *nda* kenal siapa.

(Wawancara Aslam, 4 Desember 2019)

Kemudian petisi terus tersebar melalui warganet yang menerima petisi ini di dinding media sosialnya. Salah satu kekuatan utama dari aktor gerakan ini adalah terlibatnya Nevy James untuk menyebarkan petisi tersebut. Nevy James merupakan salah satu aktor penting dalam gerakan ini yang menghubungkan isu dengan masyarakat umum. Hal ini tak lepas dari luasnya jaringan komunikasi yang dimilikinya sehingga petisi dapat menjangkau banyak orang.

Kemudian, selain jumlah penandatanganan petisi yang cukup besar, salah satu dampak dari proses penyebaran petisi adalah keterlibatan tokoh-tokoh gerakan dan akademisi dalam menandatangani petisi ini. Tokoh-tokoh ini dianggap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dinamika gerakan sosial. Keterlibatan tokoh-tokoh ini tanpa komunikasi langsung, melainkan melalui pola *share* tadi. Sebagaimana dijelaskan Rewo,

Keterlibatan Pihak lain seperti Rocky Gerung sama Pak Alwi. Ada juga beberapa akademisi lain. *Nda* ada yang hubungi langsung, kita *share-share* saja.

(Wawancara Rewo, 1 Desember 2019)

Keterlibatan tokoh yang memiliki popularitas dalam menandatangani petisi dinilai sebagai salah satu keberhasilan tersendiri. Tokoh yang terlibat seperti Alwi Rahman dan Rocky Gerung, dapat menjadi nilai jual untuk



menunjukkan seberapa pentingnya petisi ini kepada khalayak publik. Sederhananya, keterlibatan dua orang ini dapat mengangkat kepopuleran petisi ini dan hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh FISS, apalagi ini demi kebaikan bersama dan kelanjutan kehidupan segala mahluk ciptaan Tuhan. Seperti yang dijelaskan berikut,

Bagus direpro yang begitu, karena ada nilai ketokohan *toh*. Dan orang itu semakin kuat arus informasinya, ada tokoh ini bertandatangan. Tanpa pernah kita menghubungi langsung Rocky Gerung untuk bertandatangan.

(Wawancara Aslam, 4 Desember 2019)

Kehadiran petisi sebagai media untuk menggalang dukungan melalui penantandangan petisi, dimanfaatkan FISS dengan menargetkan individu maupun kelompok. Selain menggunakan media sosial untuk menyebarkan petisi, FISS juga melakukan pengenalan langsung petisi tersebut di beberapa kegiatan yang mereka laksanakan. Proses penginformasian petisi dilaksanakan di tengah berlangsungnya kegiatan formal organisasi. Terutama jika sedang mengadakan kegiatan di luar Kota Makassar dan daerah-daerah yang agak jauh dari pusat informasi. Seperti yang dijelaskan lebih lanjut,

Sempat kita *touring* kemarin ke Pangkep, ada kegiatannya FISS itu seminar tentang Gunung. Setelah itu kegiatan, ada lagi deklarasi, bertambah lagi tandatangan dari Pangkep. Terus sempat di Sinjai, dari Sinjai bertambah lagi, kayak begitu.

(Wawancara Aslam, 4 Desember 2019)

Penggunaan petisi di ruang formal tak hanya untuk menggalang dukungan semata. Petisi juga dijadikan sebagai alat tekan kepada pemerintah ketika berlangsung seminar bersama pihak Pemerintah Kabupaten Gowa.

Penginformasian kepada pemerintah dilakukan dengan memperlihatkan petisi, baik petisi cetak maupun petisi daring. Sebagaimana dijelaskan Aslam, “Dibawakan petisi cetaknya pas audiensi, terus capturan petisi online juga”, tutur informan penelitian ini.

#### **D. Pengaruh Penggunaan Petisi “Gunung *Bulu Bawakaraeng* harus segera di *heritage!*”**

Petisi *Change.org* merupakan metode gerakan dalam *cyberspace* yang sedikit banyak mempengaruhi dinamika gerakan sosial yang diinisiasi oleh FISS. Sebagaimana diketahui bahwa hingga hari ini petisi daring Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!* masih berlangsung. Namun bukan berarti tidak ada pengaruh yang diberikannya, baik signifikan maupun tidak. Untuk memahami pengaruh ini, dapat dilihat dari sudut pandang internal pembuat petisi dalam hal ini FISS dan masyarakat umum yang terlibat dalam gerakan ini.

##### **1. Internal Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS)**

Gerakan Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!* merupakan gerakan organisasional, artinya pola gerakan ini terbangun dengan kesepakatan dan alur kerja yang terorganisir sesuai capaian gerak. Petisi Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!* menjadi sebuah metode gerakan yang digunakan dengan harapan adanya perkembangan gerakan

organisasi, terkhusus di internal kelompok FISS. Sejauh ini ada dua pengaruh petisi yang ditimbulkan terhadap dinamika internal organisasi, yaitu:

**a. Memberikan Motivasi Untuk Anggota Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS)**

Dalam kerja-kerja organisasi, aktor memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap aktivitas organisasi. Apalagi khususnya di FISS, ada pembagian peran yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan perjuangan. Untuk tetap menjaga ritme gerak, penting untuk menjaga semangat gerakan yang dimiliki setiap aktor. Petisi Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!* dianggap cukup mempengaruhi psikologi anggota FISS, lebih lanjut dijelaskan,

Kalau secara psikologis di internalnya FISS terus terang bikin semangat anak-anak. Ternyata semassif *iniki* pengaruhnya orang yang bertandatangan puluhan ribu.

(Wawancara Aslam, 4 Desember 2019)

Petisi Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!* dinilai memberi dampak terhadap psikologi massa anggota FISS, terutama menyangkut semangat gerakan mereka. Jumlah penandatangan yang setiap waktu akan bertambah menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap masalah ini. Ini juga menunjukkan bahwa FISS tidak berjuang sendiri, akan puluhan ribu masyarakat yang bersepakat dengan FISS dalam memperjuangkan kelestarian Gunung Bulu Bawakaraeng dan pemberian status hukum kepada gunung ini.

## **b. Bertambahnya Jumlah Anggota FISS**

Dalam gerakan sosial, khususnya gerakan dengan capaian yang besar, jumlah kuantitas anggota cukup berpengaruh. Apalagi keterlibatan sebagai *support* dalam mengkampanyekan permasalahan ini. Popularitas petisi Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!* juga berdampak baik terhadap jumlah kuantitas anggota yang tergabung. Upaya pengkampanyean di media sosial dengan petisi ini cukup berhasil dalam menambah jumlah keterlibatan masyarakat umum yang mendukung dan mau terlibat secara aktif dalam organisasi FISS. Sebagaimana dijelaskan koordinator FISS,

Ada juga bertambah tapi saya nda bisa katakan loyalis, tapi ada *ji* yang bertahan. Kayak orang-orang daerah juga dari Pangkep dari Pinrang.

(Wawancara Rewo, 2 Desember 2019)

Upaya pengkampanyean masalah ini telah menarik perhatian masyarakat umum, tak terkecuali individu maupun komunitas di beberapa daerah lain, seperti Pangkep dan Pinrang. Hal ini tentu berdampak baik dalam pewacanaan gerakan, apalagi memang dibutuhkan gerakan lain di setiap daerah yang memiliki koridor yang sama. Karena isu Gunung Bulu Bawakaraeng bukan hanya terbatas pada teritori tertentu, melainkan setiap manusia dapat terlibat membantu mendukung diberikannya status hukum kepada Gunung Bulu Bawakaraeng.

Bertambahnya jumlah keanggotaan di FISS tentu cukup membantu dalam upaya menyebarkan isu melalui kegiatan yang dilakukan. Sebagai

organisasi yang keanggotaannya tak terikat secara legal-formal, FISS tak memiliki data penambahan jumlah anggota dalam beberapa waktu silam, yang jelas petisi ini membantu FISS dalam mendapatkan dukungan melalui keterlibatan langsung dalam organisasi. Sebagaimana dijelaskan Koordinator FISS, “ada bertambah secara individu tapi belum dicatat namanya. Karena FISS kan tidak bersifat mengikat”, ujarnya dalam wawancara.

## **2. Eksternal Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS)**

Gerakan Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage!* secara garis besar memiliki dua capaian utama, yakni kesadaran akan pentingnya memahami dan menjaga kelestarian Gunung Bulu Bawakaraeng dan memberikan perlindungan hukum kepada Gunung Bulu Bawakaraeng. Dari dua capaian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melihat pengaruh petisi ini secara eksternal FISS maka harus ditelisik pengaruh yang FISS rasakan dari masyarakat dan pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan gunung ini.

### **a) Masyarakat Umum**

Dalam upaya penyadaran gerakan ini, masyarakat menjadi subjek utama yang perlu diberikan pengetahuan terkait pola pikir dan perilaku yang sesuai dengan aturan normatif yang berlaku pada Gunung Bulu Bawakaraeng. Peran masyarakat dapat memberi pengaruh yang besar terhadap keberlangsung gerakan ini. masyarakat umum dapat mencegah dan meminimalisir proses

kerusakan yang terjadi dengan cara membangun kesepaham dengan elemen lain, termasuk FISS selaku pihak yang menginisiasi gerakan ini. sejauh ini ada dua pengaruh yang didapatkan FISS dari petisi ini oleh masyarakat, yaitu:

### **1) Dukungan Masyarakat**

Sebagai sebuah gerakan sosial, gerakan Gunung Bulu Bawakaraeng *heritage* harus bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat umum. Hal ini tentu tak lepas juga karena permasalahan yang diangkat merupakan permasalahan pola pikir dan perilaku merusak yang perlu dibenahi bersama. Dukungan masyarakat sangat perlu untuk menegaskan urgensi Gunung Bulu Bawakaraeng bagi kehidupan masyarakat yang berhubungan dengannya. Petisi daring melalui penyebaran informasi yang massif dan efisien akan memudahkan untuk menggali dukungan dari masyarakat umum. Hal ini juga yang terjadi di FISS, sebagaimana yang dijelaskan Aslam,

Banyak yang mulai gabung. Cuma ya disitu *ji*. Kayak misal dari lembaga juga yang notabenehnya mungkin kemarin *nda* bersentuhan dengan isu seperti ini, mulai gabung kayak BEM, Himpunan.

(Wawancara Aslam, 4 Desember 2019)

Dukungan dari individu maupun komunitas pun berdatangan. Salah satunya organisasi kemahasiswaan internal kampus. Dukungan ini menunjukkan bahwa organisasi kemahasiswaan internal kampus tak hanya disibukkan dengan isu internal kampus semata, tapi juga isu eksternal yang memiliki pengaruh besar bagi kehidupan. Wujud dukungan yang diberikan selain menandatangani petisi adalah juga terlibat dalam beberapa kegiatan

yang FISS buat, seperti diskusi. Hal ini juga untuk meretas eksklusivisme isu yang tak terbatas pada kelompok FISS semata.

Dukungan juga datang dari media kampus, dalam hal ini pers mahasiswa. Keterlibatan pers disini untuk membantu memberitakan aktivitas dan perkembangan petisi daring ini, “ada tiba-tiba media datang wawancara, termasuk media kampus, dikasih masuk koran”, ujar Rewo dalam Wawancara. Peran media secara konseptual cukup besar, karena dapat membantu mengabarkan aktivitas dan kelanjutan gerakan, selain itu dapat pula membantu kampanye gerakan yang diperjuangkan oleh FISS.

## **2) Menurunnya Jumlah Kunjungan ke Gunung**

Permasalahan yang dihadapi oleh Gunung Bulu Bawakaraeng selain pola pikir juga perilaku pengunjung yang massif dan sporadis. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, area Gunung Bulu Bawakaraeng dianggap bukan area yang stabil untuk dikunjungi secara besar-besaran. Terlebih lagi di tahun 2004 terjadi megalongsor Gunung Bulu Bawakaraeng. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan tersendiri untuk melakukan kunjungan ke puncak gunung.

Salah satu wujud perilaku yang sering dikritik oleh FISS adalah kunjungan pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Aktivitas mengunjungi Gunung Bulu Bawakaraeng pada tanggal 17 Agustus dianggap menjadi problem tersendiri dalam memandang gunung dan juga kerap terjadi perilaku kunjungan yang tidak sesuai seperti sampah yang berserakan. Dari petisi yang dibuat dan gerakan-gerakan lainnya, FISS mengklaim telah menurunkan

jumlah pengunjung di Gunung *Bulu* Bawakaraeng. Sebagaimana dijelaskan Rewo, “Paling tidak berkurang jumlah pendakian massif,” ujarnya.

Tabel 5.1 Jumlah Kunjungan 17 Agustus

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung
1.	2015	6.453
2.	2016	4.298
3.	2017	-
4.	2018	561
5.	2019	3.757

Sumber : Dikutip dari beberapa Media (Liputan 6, 2015), (Merdeka, 2016), (Kabar News, 2018), dan (Tagar.id, 2019)

Dari data yang disajikan pada tabel diatas, nampak terjadi penurunan dalam kurun 2016 hingga 2018 (data 2017 tak ditemukan). Penurunan terjadi hingga titik 10 % dari tahun 2016 dengan jumlah 4.298 ke 561 pengunjung. Meski pada dasarnya data ini diambil dalam waktu sebelum berlangsungnya aktifitas upacara. Namun, terjadi peningkatan kembali yang cukup signifikan di tahun 2019, dengan jumlah pengunjung sebesar 3.757 orang, bahkan ditaksir Basarnas dapat terus bertambah hingga 5.000 pengunjung (Tagar.id, 2019). Dari data statistik ini, nampaknya metode kampanye 17 agustus yang dilakukan FISS ditahun 2018 cukup berpengaruh pada turunnya jumlah pengunjung. Namun di tahun berikutnya, pada tahun 2019 terjadi peningkatan kembali secara signifikan.

Salah satu dampak besar dari kunjungan yang massif seperti pada kasus 17 Agustus setiap tahunnya di Gunung Bawakaraeng secara materiil adalah



tumpukan sampah yang dibawa pengunjung naik. Di tahun 2017 lalu, kegiatan kunjungan Gunung di Indonesia mendapat buangan sampah sebesar 4 Ton. Di gunung Bulu Bawakaraeng sendiri, Trashbag Community, salah satu komunitas pembersihan sampah di Gunung Bawakaraeng membersihkan 265 kg sampah dari gunung ini (Jawa Pos, 2018). Buangan sampah ini mencemari fungsi gunung Bawakaraeng sebagai menara air, ekosistem mahluk lain selain manusia dan juga mencemari kedudukan dan sejarah gunung Bulu Bawakaraeng.

#### **b) Pemerintah**

Perhatian pemerintah menjadi salah satu hal penting dalam gerakan ini. Ini tentu tak lepas dari posisi struktural yang dipegang pemerintah. Selain itu, anggapan bahwa mekanisme pengajuan *cultural landscape heritage* harus melalui pemerintah setempat. Posisi pemerintah disini dapat dilihat sebagai mitra kritis yang saling berhubungan untuk mewujudkan tujuan itu. Petisi dijadikan sebagai media untuk menggalang dukungan dari publik sebagai daya tekan kepada pihak pemerintah provinsi dan daerah.

Pemerintah menjadi subjek yang ditujukan dalam petisi Gunung Bulu Bawakaraeng harus segera di *heritage*!. Dari tuntutan yang tertuang dalam petisi ini, FISS mendesak pemerintah untuk memediasi proses *heritage* dan memberikan perlindungan hukum. Tuntutan yang ditekankan dalam petisi menjadi sebuah aspirasi politik pihak FISS kepada pemerintah selaku pemegang kekuasaan. Kehadiran petisi dianggap penting sebagai upaya

mediasi dalam hal jumlah penandatanganan yang akan dijelaskan kepada pihak pemerintah, sebagaimana yang dijelaskan Akbar,

Kalau presentasi *ki* sama pemerintah, selalu dilampirkan itu. Kalau secara hukum, nda ada *ji* kekuatannya. Urgensinya pada saat itu *ji* karena ketika itu dibacakan psikologinya orang merasa kaget dan *urgent* sekalikah ini. Karena dia bicara angka toh.

(Wawancara Akbar, 2 Desember 2019)

Satu hal yang perlu di garis bawahi, dalam petisi *change.org* tidak memiliki legitimasi hukum dalam setiap petisi yang dibuat. Karenanya hanya dijadikan sebagai lampiran mediasi kepada pihak pemerintah. Namun bukan berarti tak memiliki pengaruh, justru jumlah penandatanganan menjadi sebuah nilai tukar tersendiri. Jumlah penandatanganan akan memperlihatkan sekian banyak orang yang berdiri di samping FISS. Oleh karenanya ada tekanan yang diberikan saat proses penyampaian tuntutan petisi.

Perhatian pemerintah sejauh ini masih berkisar di pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten Gowa yang diawal merespon isu ini. Kehadiran petisi menjadi pengingat akan betapa pentingnya masalah ini untuk segera diatasi. Hal ini juga dipertegas Aslam,

Kalau dari pemerintah nasional *nda* ada, tapi kalau dari Pemkab itu dijadikan bahan untuk kita audiensi sama mereka menguatkan posisinya ini barang bahwa secara politis banyak orang yang dukung.

(Wawancara, Aslam 4 Desember 2019)

Martin dan Kracher (2008) memberikan kerangka evaluatif dari keberhasilan petisi daring. Kerangka *evaluative* ini terdiri dari dua tingkat, yaitu *Ultimate* dan *intermediate*. *Ultimate* menjelaskan bahwa taktik protes

daring dapat disebut berhasil jika mencapai tujuan akhir yaitu mendorong perubahan/change dalam kebijakan atau praktik, sedangkan *intermediate* menjelaskan bahwa walaupun taktik protes daring tidak mengubah dan memberikan dampak, taktik protes daring dapat disebut berhasil jika mencapai tujuan *intermediate* yaitu menangkap perhatian/*awareness* pemimpin atau pembuat kebijakan (Simamora, 2017)

Sejauh perkembangannya, petisi ini masih sementara dalam proses penggunaan. Dalam artian, ukuran keberhasilan petisi dilihat dari sejauh mana perkembangan petisi ini. Dalam kerangka evaluatif, dapat dikatakan bahwa petisi ini telah mencapai tujuan *intermediate*, namun tak seutuhnya. Karena petisi ini bukan hanya satu-satunya metode gerakan yang digunakan. Maka dari itu, secara keseluruhan metode gerakan, termasuk penggunaan petisi daring ini cukup menarik perhatian pembuat kebijakan dalam hal ini Pemerintah daerah Gowa. Meskipun pemerintah Gowa hanya menerima mediasi yang dilakukan atas permintaan pemuda Gowa. Lebih lanjut dijelaskan,

Petisi dipresentasikan juga, begini organisasi pemuda Gowa menginisiasi pertemuan dengan Pemda Gowa untuk mempresentasikan petisi. Hasilnya itu kita akan mengadakan kegiatan bersama dengan Pemda Gowa, itu *mi* seminar.

(Wawancara Rewo, 2 Desember 2019)

Namun yang cukup disayangkan, belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah Kabupaten Gowa pasca pertemuan tersebut. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Gowa membuat seminar untuk mendiskusikan

beberapa hal terkait Gunung Bulu Bawakaraeng. Berbeda halnya dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga hari ini belum merespon petisi ini. Padahal secara sistematis, untuk sampai ke status hukum *heritage*, perlu dukungan dari Pemprov Sulawesi Selatan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Gerakan Gunung Bulu Bawakaraeng *heritage* merupakan salah satu model gerakan sosial baru yang mengangkat fokus permasalahan kelestarian lingkungan, terkhusus pada permasalahan yang terjadi di Gunung Bulu Bawakaraeng. Isu ini dianggap sebagai hal yang sangat fundamental karena tak hanya menyangkut permasalahan lingkungan secara fisik saja, melainkan pada segi kedudukan dan sejarah yang hingga kini berperan besar dalam kehidupan mahluk di sekitarnya. Berbagai kerusakan yang terjadi di gunung ini dianggap berawal dari cara pandang eksplotatif dengan ukuran subjek-objek, dimana gunung dianggap sebagai objek eksploitatif. Akibatnya, terjadi kerusakan dari segi materiil maupun non materiil yang dilakukan berbagai pihak. Melihat berbagai kerusakan yang terjadi di Gunung Bulu Bawakaraeng, maka terbentuklah komunitas bernama Forum Intelektual Selatan Sulawesi (FISS) yang konsen pada masalah lingkungan dan pendidikan. Ada dua alternatif yang diberikan FISS selaku kelompok yang fokus mengawal isu ini, yaitu memperbaiki cara pandang melihat alam dan memberikan status hukum kepada gunung Bulu Bawakaraeng. Tawaran pemikiran diistilahkan dengan paradigma intersubjektif atau disebut paradigma Kepecintaalaman. Sedangkan terkait

regulasi, FISS mendorong agar diberikannya status hukum *cultural landscape heritage* kepada gunung tersebut.

2. Sebagai sebuah permasalahan yang serius, maka diperlukan perluasan wacana untuk menarik perhatian masyarakat, disinilah peran petisi diperlukan. Di tahun 2018 bertepatan dengan deklarasi organisasi FISS, petisi mulai dijalankan sebagai metode alternatif untuk mengumpulkan dukungan dari individu maupun komunitas. Petisi daring di *change.org* merupakan salah satu model petisi selain petisi fisik yang digunakan sebagai media untuk kampanye dan daya tekan politik kepada pemerintah. Adapun bentuk penginformasian petisi ini dilakukan dengan metode *share*, yaitu menyebarkan petisi melalui media-media sosial di internet. Selain itu, petisi juga digunakan sebagai alat penginformasian langsung kepada publik ketika FISS mengadakan kegiatan, seperti saat melakukan aktifitas diluar Makassar dan ketika melakukan mediasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Gowa.
3. Sejauh ini petisi masih digunakan FISS, dikarenakan tujuan gerakan sosial ini belum tercapai. Dengan keterlibatan 32.924 masyarakat sebagai bentuk dukungan kepada masalah ini, turut mempengaruhi perkembangan gerakan sosial ini. Di internal FISS sendiri, petisi mempengaruhi motifasi anggota FISS dan juga menambah jumlah anggota organisasi. Jumlah penandatanganan petisi mempengaruhi psikologi anggota FISS ketika melihat banyaknya masyarakat yang mendukung mereka. Selain itu, terdapat penambahan jumlah anggota organisasi yang menunjukkan simpati kepada gerakan ini. Tentu juga tak lepas

dari upaya untuk membangun keresahan bersama yang dilakukan melalui petisi dan metode gerakan lainnya.

Selain itu, petisi juga berpengaruh kepada individu maupun kelompok diluar organisasi ini, seperti perhatian masyarakat dan pemerintah akan permasalahan ini. Pengaruh petisi terhadap masyarakat dapat dilihat dari dukungan yang diberikan oleh organisasi kemahasiswaan dan beberapa media

Selain itu, terlihat juga terjadi penurunan jumlah pengunjung Gunung Bulu Bawakaraeng untuk aktivitas kunjungan di setiap tanggal 17 agustus , dimana sebelumnya pada tahun 2016 mencapai 4.298 pengunjung, menurun di tahun 2018 ke 561 pengunjung. Meskipun pada 2019 terjadi peningkatan kembali. Kepada pemerintah, petisi menjadi alat penginformasian terkait permasalahan yang terjadi di Gunung Bulu Bawakaraeng. Proses penginformasian ini dilakukan saat berlangsungnya kegiatan bersama dengan pihak pemerintah Kabupaten Gowa. Namun hingga kini belum ada kejelasan yang diberikan pihak pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi.

## **B. Saran**

1. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan agar kiranya memperhatikan berbagai isu di masyarakat dengan media gerakan yang digunakan, termasuk petisi daring. Karena harus diakui bersama, terdapat jarak yang besar antara pemerintah dengan masyarakat umum untuk menyampaikan aspirasi mereka, oleh karena itu

dibutuhkan perhatian lebih yang lebih inovatif untuk merawat keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

2. Pengguna petisi, untuk lebih memperhatikan penggunaan petisi terutama jika hendak membuat tuntutan melalui petisi. Karena berhasil tidaknya petisi sangat ditentukan oleh urgensi masalah yang diangkat untuk menarik dukungan dari publik. Serta menyusun strategi agar tujuan petisi dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan. Demikian halnya dengan kelompok FISS, agar gerakan sosial ini terus berlanjut dengan menyeimbangkan gerakan media lainnya, termasuk diskusi dan kegiatan lainnya yang menunjang kontinuitas gerakan dan jumlah penandatanganan petisi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, S. (2013). *Sejarah Pemikiran Barat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Alam, D. M. (2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Haji Bawakaraeng*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Andreas, D., & Adam, A. (2018, February 9). *Tirto.id*. Retrieved from Tirto.id: <https://Tirto.id/8-konglomerat-media-di-Indonesia-via-jalur-medua-tv-amp-cetak-cEv7>
- Bungin, B. (2015). *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Change.org*. (2018). *Catatan Akhir Tahun, Dinamika Gerakan Digital Tahun 2018*. Retrieved Desember 28, 2019, from *Change.org*: <https://www.change.org/I/id/dinamika-gerakan-digital-tahun-2018>
- Change.org*. (2018). *Dampak Change.org*. Retrieved Maret 20, 2019, from *Change.org*: <https://www.change.org/impact>
- Dedi, M. (2017). Pengorganisasian gerakan sosial berbasis petisi online (studi kasus : pengguna *change.org* Indonesia Chapter). *Jurnal Informasi Kajian ilmu komunikasi Vol 47. No 1*.
- Destrity, N. A. (2018). Petisi online sebagai media advokasi alternatif dalam upstream social marketing. *Jurnal Komunikasi Global, Volume 7, Nomor 2*.
- Diamond, J. (2016). *Guns, Germs & Steel : Rangkuman Riwayat Masyarakat Manusia*. Jakarta: KPG.
- Fajar, J. (2019). *Mongabay.co.id : Ancaman Kerusakan Ekologi Bumi karena Pembangunan*. Retrieved Januari 4, 2020, from Mongabay.co.id: [www.mongabay.co.id/ancaman-kerusakan-ekologi-bumi-karena-pembangunan/amp/](http://www.mongabay.co.id/ancaman-kerusakan-ekologi-bumi-karena-pembangunan/amp/)
- Goldblatt, D. (2015). *Analisa Ekologi Kritis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Hadi, A. (2005). *Matinya dunia Cyberspace: Kritik Humans Mark Slouka Terhadap Jagat Maya*. Yogyakarta: LKiS.
- Hamid, U. (2014). *Digital Nation Movement*. Yogyakarta: Benteng.
- Hardiman, F. B. (2010). *Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indonesia, A. p. (2019). *Laporan Survey : Penetrasi & profil perilaku pengguna internet Indonesia tahun 2018*. APJII.

- Indonesia, C. (2018, Desember 12). *CNN Indonesia*. Retrieved Oktober 24, 2019, from CNN Indonesia: [cnindonesia.com/gaya-hidup/20181211154501-269-352809/sejenak-memahami-permasalahan-gunung](http://cnindonesia.com/gaya-hidup/20181211154501-269-352809/sejenak-memahami-permasalahan-gunung)
- Jasmi, K. A., & Hassan, N. H. (2013). AL-QURAN DAN GEOLOGI. *Universiti Teknologi Malaysia*.
- Jawa Pos. (2018, Februari 21). *Jumlah Sampah di 17 Gunung Capai Empat Ton, Ini Buktinya*. Retrieved Januari 14, 2020, from JawaPos.com: <https://www.jawapos.com/nasional/21/02/2018/jumlah-sampah-di-17-gunung-capai-empat-ton-ini-buktinya/>
- Kabar News. (2018, Agustus 17). *BPBD Sinjai: Ada 76 Tim Pendaki Kibarkan Merah Putih di Puncak Gunung Bawakaraeng*. Retrieved Januari 14, 2020, from Kabar.news: <https://kabar.news/bpbd-sinjai-ada-76-tim-pendaki-kibarkan-merah-putih-di-puncak-gunung-bawakaraeng>
- Kadarsih, R. (2008). Demokrasi dalam ruang publik, sebuah pemikiran ulang untuk media massa di Indonesia. *Jurnal Dakwah Vol.IX* , 1.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. (2018, February 19). *Jumlah Pengguna Internet 2017 Meningkat, Kominfo Terus Lakukan Percepatan Pembangunan Broadband*. Retrieved Januari 26, 2019, from Kominfo: [https://www.kominfo.go.id/content/detail/12640/siaran-pers-no-53hmkominfo022018-tentang-jumlah-pengguna-internet-2017-meningkat-kominfo-terus-lakukan-percepatan-pembangunan-broadband/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12640/siaran-pers-no-53hmkominfo022018-tentang-jumlah-pengguna-internet-2017-meningkat-kominfo-terus-lakukan-percepatan-pembangunan-broadband/0/siaran_pers)
- Leda, H. A. (2018). *Strategi Perlawanan Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Waduk Llambo di Desa Rendubutowe, Kabupaten Nagekoe NTT*. Jogjakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.
- Liputan 6. (2015, Agustus 17). *6.453 Pendaki Rayakan Hari Kemerdekaan di Gunung Bawakaraeng*. Retrieved Januari 14, 2020, from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/news/read/2295259/6453-pendaki-rayakan-hari-kemerdekaan-di-gunung-bawakaraeng>
- Merdeka. (2016, Agustus 17). *4.298 Pendaki padati Gunung Bawakaraeng buat upacara 17 Agustus*. Retrieved Januari 14, 2020, from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/4298-pendaki-padati-gunung-bawakaraeng-buat-upacara-17-agustus.html>
- Mulyoto , G. P., & Mulyadi, G. P. (2017). Petisi online sebagai modal sosial (studi fenomenologi situs *www.change.org* pada tahun 2015). *Jurnal Pancasila dan Kewarganegeraan Vol.2 No.2*.

- Muthahhari, M. (2002). *Manusia dan Alam Semesta*. Jakarta: Lentera.
- Nastiti, A. (n.d.). *Gerakan Sosial dalam Konektivitas Digital*. Retrieved 12 26, 2019, from Remotivi: <http://www.remotivi.or.id/kupas/408/Gerakan-Sosial-dalam-Konektivitas-Digital>
- Nugroho, Y., Syarief, & Shinta, S. (2012). *Melampaui aktivisme Click? Media baru dan proses politik dalam Indonesia kontemporer*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Pamungkas, C. (2015). Global village dan globalisasi dalam konteks ke-Indonesiaan. *Jurnal LIPI Global and strategic, th.9 no.2.*, 246-247.
- Perry, M. (2013). *Peradaban barat:dari revolusi Prancis hingga zaman global*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Pratomo, Y. (2019, Mei 2019). *Kompas Tekno*. Retrieved Juni 12, 2019, from Kompas.com: <https://tekno.kompas.com/read/2019/05/16/03260037/apjii-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-171-juta-jiwa>
- Raf, N. (2014, April). *Dinamika Teori Gerakan Sosial. Socius, XV*.
- Ritzer, G. (2014). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Runa, I. W., Warnata, I. N., & Mahaputra, I. N. (2011, Desember 15). KONDISI KAWASAN HERITAGE. *Jurnal Universitas Warmadewa*, 4.
- Rush, M., & Althoff, P. (2011). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rusmanto, J. (2013). *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Antara Kekuatan dan Kelemahannya*. Sidoarjo: Zifatama.
- Sari, D. K., & Royke, R. (2015). Gerakan Sosial baru di ruang publik virtual pada kasus Sarinah. *Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 12 No.1*, 105-118.
- Simamora, R. (2017). Petisi Online sebagai alat advokasi kebijakan : Studi kasus *change.org* Indonesia Periode 2015-2016. *Jurnal Komunikasi Indonesia Volume VI Nomor 1*.
- Simon, R. (2004). *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Singh, R. (2010). *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Situmorang, A. W. (2013). *Gerakan Sosial : Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suka, G. (n.d.). *Buku Bahan Ajar Teori Etika Lingkungan*. Bali: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana.
- Sukmana, O. (2013, Oktober). KONVERGENSI ANTARA RESOURCE MOBILIZATIONTHEORY DAN IDENTITYORIENTED THEORYDALAM STUDI GERAKAN SOSIAL BARU. *Sosiologi Reflektif, Volume 8, No 1*.
- Sulawesi, F. I. (2018). *GUNUNG BULU BAWAKARAENG HARUS SEGERA DIHERITAGE!* Retrieved from GUNUNG BULU BAWAKARAENG HARUS SEGERA DIHERITAGE!: <https://www.change.org/p/gubernur-sulsel-tetapkan-gunung-bulu-bawakaraeng-sebagai-kawasan-heritage>
- Sulawesi, F. I. (2019, Februari 9). *Press Release : MEMBACA BANGSA DI GUNUNG BULU BAWAKARAENG*. Retrieved Oktober 15, 2019, from <https://fissdotpress.wordpress.com/>: <https://fissdotpress.wordpress.com/>
- Supriadi, Y. (2017). Relasi Ruang Publik dan Pers Menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnallisme Vol.1 No.1*.
- Suseno, F. M. (2000). *Karl Marx : Dari sosialisme utopis ke perselisihan revisionisme*. Jakarta: Gramedia.
- Susilo, R. K. (2009). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sztompka, P. (2008). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Tagar.id. (2019, Agustus 17). *Basarnas Makassar Kawal Peringatan HUT RI di Gunung*. Retrieved Januari 14, 2020, from Tagar.id: <https://www.tagar.id/basarnas-makassar-kawal-peringatan-hut-ri-di-gunung>
- We the People. (2013, January 15). *About We the People*. Retrieved Agustus 22, 2019, from We The People: <https://petitions.whitehouse.gov/about>
- Wikiqoutes. (2019, 09 25). *Wikiqoutes*. Retrieved 10 17, 2019, from Wikiqoutes: [https://en.wikiquote.org/wiki/Slavoj\\_%C5%BDi%C5%BEek](https://en.wikiquote.org/wiki/Slavoj_%C5%BDi%C5%BEek)
- Zamroni, M. (2009). Perkembangan teknologi informasi dan dampaknya terhadap kehidupan. *Jurnal Dakwah Volume X*, 199-207.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

➤ **Lampiran 1**

**Pedoman Wawancara**

A. Bagaimana proses gerakan sosial Gunung Bulu Bawakaraeng *Herritage*?

1. Mengapa memperjuangkan Gunung Bawakaraeng?
2. Bagaimana proses perjalanan gerakan sosial ini?
3. Bagaimana dukungan dari pihak lain dalam gerakan sosial ini?
4. Bagaimana hambatan yang dialami selama upaya gerakan sosial ini?
5. Apa tawaran alternatif yang diberikan?

B. Bagaimana proses pemanfaatan petisi *change.org*?

1. Bagaimana pandangan terkait petisi daring?
2. Mengapa menggunakan media *change.org* untuk gerakan ini?
3. Bagaimana strategi pemanfaatan petisi?
4. Bagaimana upaya pengkampanyean petisi dan gerakan lingkungan bawakaraeng *herritage* secara umum?
5. Bagaimana perkembangan gerakan petisi Gunung Bawakaraeng *herritage*?

C. Bagaimana pengaruh petisi Gunung Bulu Bawakaraeng *Herritage*?

1. Bagaimana dampak yang dirasakan pasca penggunaan petisi?
2. Bagaimana respon dari pemerintah atas petisi ini?
3. Bagaimana respon dari masyarakat atas petisi ini?
4. Apa langkah yang dilakukan untuk melengkapi gerakan?
5. Bagaimana keterlibatan anda dalam menggunakan petisi *change.org*?

➤ Lampiran 2

Dokumentasi Gambar







## Riwayat Penulis

Nama : Azwar Radhif

Tempat / Tanggal Lahir : Makassar, 15 Februari 1996

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Telepon : 085341736018

E-mail : azwar.radhif@gmail.com

Alamat : Jalan Towerkanjovank, Tamalanrea Makassar

Nama Orang Tua

1. Ayah : Muh. Zaid Yusuf Naru
2. Ibu : Almarhumah Wahidah Sahnas

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : -

Cita-cita : Penulisnya orang miskin

Motto Hidup : Sebaik-baiknya Ilmu adalah Pengamalannya

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 4 Parepare
2. SMPN 1 Parepare
3. SMK Harapan Bangsa Jambi
4. Departemen Sosiologi Universitas Hasanuddin



Riwayat Organisasi :

1. Biro Advokasi dan Isu Strategis Keluarga Mahasiswa Sosiologi FISIP Unhas periode 2017-2018.
2. *Intermedite Student Leadership Training* BEM KM FKM Unhas 2017.
3. Biro Kaderisasi dan Pendidikan Ikatan Keluarga Mahasiswa Parepare Periode 2017-2018.
4. Biro Riset dan Strategis Lingkar Advokasi Mahasiswa (LAW) Unhas periode 2017-2018.
5. Resist Sospol Unhas.
6. Latihan Kader Lanjutan (LKL) Kemasos FISIP Unhas 2018.
7. Ketua Umum Kemasos FISIP Unhas periode 2018.
8. Badan Pertimbangan Organisasi Kemasos FISIP Unhas periode 2018-2019.
9. Majelis Mahasiswa Federasi Mahasiswa Unhas (FM-UH) Periode 2019.
10. Komisi Legislasi dan Kebijakan Dewan Mahasiswa Kema FISIP Unhas periode 2019-2020.

11. Biro Riset, Pendidikan dan Literasi Front Nadhliyin  
untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)  
Makassar.